

Pengaruh *Corporate governance* Terhadap *Tax avoidance*
(Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Energy yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2023)

Skripsi
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S1
Program Studi Akuntansi



Disusun Oleh:
Mazro'atul Ulya Ahmad
31402100070

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**Pengaruh *Corporate governance* Terhadap *Tax avoidance*
(Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Energy yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2023)**

Disusun oleh :

Mazro'atul Ulya Ahmad

NIM : 31402100070

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya dapat diajukan dihadapan
sidang panitia ujian usulan penelitian Skripsi Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Islam Sultan Agung

Semarang, 13 November 2025

Pembimbing



Imam Setijawan, SE.,M,Si

NIK. 0026037201

HALAMAN PERSETUJUAN

**Pengaruh *Corporate governance* Terhadap *Tax avoidance*
(Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Energy yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2023)**

Disusun oleh :

Mazro'atul Ulya Ahmad

NIM : 31402100070

Telah di setujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 13 November 2025

Dosen Pembimbing

Imam Setijawan, SE., M.Si
NIK. 0026037201

Skripsi telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar
Sarjana Akuntansi Program S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Islam Sultan Agung
Semarang, 13 November 2025

Ketua program Studi Akuntansi

Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ph.D., Ak., CA., IFP., AWP
NIK. 211403012

PERNYATAAN ORIGINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mazro'atul Ulya Ahmad

NIM : 31402100070

Program Studi : S1 Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Pengaruh *Corporate governance* Terhadap *Tax avoidance* (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Energy yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2023)”** adalah hasil karya sendiri dan bukan hasil dari plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain. Segala kutipan atau pendapat pihak lain yang digunakan dalam skripsi ini telah dicantumkan sesuai dengan kode etik ilmiah. Pendapat pada hasil karya orang lain yang terdapat dalam penelitian skripsi ini dikutip berdasarkan kode etik ilmiah penelitian skripsi. Apabila kemudian hari skripsi ini terbukti hasil plagiasi dari karya tulis oranglain saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 13 Agustus 2025



Mazro'atul Ulya Ahmad
NIM. 31402100070

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Mazro'atul Ulya Ahmad
NIM	: 31402100070
Program Studi	: S1 Akuntansi
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

"Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Energy yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2023)"

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 24 November 2025
Yang menyatakan,



Mazro'atul Ulya Ahmad

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Puji syukur diucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan judul **“Pengaruh *Corporate governance* Terhadap *Tax avoidance* (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Energy yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2023)”**

Laporan proposal skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Program Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sultan Agung. Selama proses bimbingan skripsi peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Heru Sulistyono, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Ibu Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Akt., CA., IFP., AWP selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Imam Setijawan, SE., Akt., M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan serta seluruh staff tata dan perpustakaan atas segala bantuan selama proses penyusunan proposal penelitian ini hingga selesai.

5. Kedua orangtua tercinta, Bapak Achmad dan Ibu Kobilatun, atas segala doa, dukungan, kasih sayang dan pengorbanan yang telah diberikan selama ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan Bapak dan Ibu dengan Surga-Nya kelak.
6. Keluarga besar yang senantiasa memberikan doa dan dukungan, khususnya kakak peneliti Ferman Alifudin dan Muhammad Mustagfirin yang telah memberikan support dan motivasi selama penelitian.
7. Seluruh teman-teman seperjuangan di program Studi S1 Akuntansi UNISSULA angkatan 2021 atas kebersamaan dan semangat selama menempuh perjalanan akademik.
8. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung.

Penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, masih diperlukan saran dan kritik untuk membangun penyusunan yang baik. Semoga skripsi dapat memberikan manfaat bagi pihak yang memerlukan.

Semarang, 13 November 2025

Peneliti



Mazro'atul Ulya Ahmad
NIM. 31402100070

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“ Tidak ada kejadian tanpa izin Allah, dan keimanan yang teguh akan menuntun hati menuju ketenangan. Allah maha mengetahui segala sesuatu”

(QS. At-Taghābun: 11)

PERSEMBAHAN :

Tiada lembar paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan.

Skripsi ini saya persembahkan sebagai bentuk syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan kemudahan, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan terimakasih terhadap orang tua tercinta, kakak-kakak tersayang dan teman-teman yang melalui memberikan dukungannya serta mengusahakan segala hal disetiap proses penulisan skripsi ini.

Tak lupa untuk diriku sendiri yang telah bertahan, berjuang dan tidak menyerah dalam keadaan apapun yang terjadi.

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh *Corporate governance* yang diukur menggunakan variabel Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Kualitas Audit dan Komite Audit terhadap *tax avoidance* di perusahaan sektor energy yang terdaftar di BEI periode 2021-2023. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data penelitian yang diperoleh dari data sekunder dengan *financial statement* dan *annual report*. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* sehingga terdapat 39 perusahaan dengan 119 sampel data. Namun, terdapat 20 sampel outlier sehingga sampel yang diolah sejumlah 89 sampel. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dan diolah dengan aplikasi *software* SPSS versi 26. Sehingga hasil dari penelitian ini secara simultan menyatakan bahwa Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Kualitas Audit dan Komite Audit itu berpengaruh signifikan terhadap *Tax avoidance*. Namun, secara parsial Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*, Komisaris Independen tidak berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance* sedangkan Kualitas Audit dan Komite Audit tidak berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.

Kata kunci: Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Kualitas Audit, Komite Audit, *Tax Avoidance*



ABSTRACT

The objective of this study is to analyze the effect of corporate governance, measured using the variables of institutional ownership, independent commissioners, audit quality, and audit committees, on tax avoidance in energy sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the period 2021-2023. This study uses a quantitative method with research data obtained from secondary data in the form of financial statements and annual reports. The sampling technique used is purposive sampling, resulting in 39 companies with 119 data samples. However, there were 20 outlier samples, so the number of samples processed was 89. This study uses multiple linear regression analysis and is processed using SPSS software version 26. The results of this study simultaneously state that Institutional Ownership, Independent Commissioners, Audit Quality, and Audit Committees have a significant effect on tax avoidance. However, partially, Institutional Ownership has a negative effect on Tax Avoidance, Independent Commissioners do not have a negative effect on Tax Avoidance, while Audit Quality and Audit Committees do not have a positive effect on Tax Avoidance.

Keywords: *Institutional Ownership, Independent Commissioners, Audit Quality, Audit Committee, Tax avoidance*



INTISARI

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Kualitas Audit dan Komite Audit terhadap *Tax avoidance* di perusahaan sektor energy yang terdaftar Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021-2023. Dalam latar belakang penelitian ini penerimaan pajak itu salah satu pendapatan yang diinginkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendukung pertumbuhan ekonomi pada setiap daerah, suatu masalah pada tinggi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam perusahaan terhadap kewajiban perpajakan yang menjadi akibat tidak tercapainya penerimaan pajak di suatu negara. Namun menurut perusahaan pajak itu beban yang hendak merugikan perusahaan karena dapat mengurangi laba perusahaan.

Penelitian ini berlandaskan pada teori agensi atau teori keagenan. Teori ini menjelaskan bahwa hubungan antara pemberi kuasa (prinsipal) dan orang yang diberi kuasa (agent) itu sebuah kesepakatan kerja, dimana manajemen bertugas mengelola kepentingan principal berdasarkan kesepakatan yang telah di setujui kesepakatan itu mengatur tentang hak dan kewajiban setiap pihak untuk mencapai manfaat optimal di kedua belah pihak dengan mencapai tujuan yang sama. Dapat diasumsikan agent yang dapat mensejahterakan individunya atau perusahaannya sendiri sehingga dalam teori agensi ini *corporate governance* dapat menjadi alat pengawasan dalam mengurangi permasalahan keagenan, dan memastikan agent melakukan tindakan yang sesuai kepentingan pada prinsipal.

Penelitian ini terdapat empat hipotesis pada penelitian ini yaitu 1) Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, 2)

Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, 3) Kualitas Audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* 4) Komite Audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan data sekunder dalam bentuk *financial statement* dan *annual report* di perusahaan energy yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021-2023. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling dan diperoleh 39 perusahaan dengan total sampel 119 selama 3 tahun dan dikurangi dengan outlier 20 sampel sehingga data yang digunakan 89 sampel. Sedangkan teknik analisis menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dan pengujianannya menggunakan uji analisis deskriptif, uji asumsi klasik, uji kelayakan model dan uji hipotesis yang di olah dengan aplikasi SPSS versi 26. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap *Tax avoidance*, Komisaris Independen tidak berpengaruh negatif terhadap *Tax avoidance*, Kualitas Audit tidak berpengaruh positif terhadap *Tax avoidance* dan Komite Audit tidak berpengaruh positif terhadap *Tax avoidance*.

Penelitian ini memiliki keterbatasan hanya berfokus pada sektor energy sehingga tidak dapat menggambarkan kondisi sektor lain yang memiliki karakteristik yang berbeda. Keterbatasan pada variabel yang digunakan dalam penelitian terbatas pada variabel kepemilikan institusional, komisaris independen, kualitas audit dan komite audit hanya mempengaruhi 9,3% terhadap *tax avoidance*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN ORIGINALITAS SKRIPSI	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	v
KATA PENGANTAR.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
INTISARI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Pertanyaan penelitian	10
1.4 Tujuan Penelitian	10
1.5 Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
2.1 Landasan Teori	12
2.1.1 Agency Theory	12
2.2 Variabel-Variabel Penelitian	13
2.2.1 <i>Tax avoidance</i>	13
2.2.2 <i>Corporate governance</i>	14
2.2.2.1 Kepemilikan Institusional	15

2.2.2.2	Komisaris Independen	16
2.2.2.3	Kualitas Audit.....	17
2.2.2.4	Komite Audit	18
2.3	Penelitian Terdahulu	20
2.4	Pengembangan Hipotesis	27
2.4.1	Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap <i>Tax avoidance</i>	27
2.4.2	Pengaruh Komisaris Independen terhadap <i>Tax avoidance</i>	28
2.4.3	Pengaruh Kualitas Audit terhadap <i>Tax avoidance</i>	29
2.4.4	Pengaruh Komite Audit terhadap <i>Tax avoidance</i>	30
2.5	Kerangka Penelitian.....	31
BAB III METODE PENELITIAN		32
3.1	Jenis Penelitian	32
3.2	Populasi dan Sampel	32
3.2.1	Populasi	32
3.2.2	Sampel	33
3.3	Sumber dan Jenis Data	33
3.4	Metode Pengumpulan Data	34
3.5	Variabel Penelitian, Definisi Operasional Variabel dan Indikator	34
3.5.1	<i>Tax avoidance</i> (Y).....	35
3.5.2	Kepemilikan Institusional (X).....	35
3.5.3	Komisaris Independen (X).....	36
3.5.4	Kualitas Audit (X)	36
3.5.5	Komite Audit (X)	36
3.6	Teknik Analisis.....	39
3.6.1	Uji Statistik Deskriptif.....	39
3.6.2	Uji Asumsi Klasik	40
3.6.3	Analisis Regresi Linier Berganda	42
3.6.4	Uji Goodness of Fit Model	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		45
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	45

4.2 Uji Statistik Deskriptif.....	46
4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	49
4.3.1Hasil Uji Normalitas.....	49
4.3.2Hasil Uji Multikolinieritas.....	52
4.3.3Hasil Uji Autokorelasi.....	53
4.3.4Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	54
4.4 Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	55
4.5 Hasil Uji Goodness Of Fit.....	57
4.5.1Hasil Uji Koefisiensi Determinasi (R^2)	57
4.5.2Hasil Uji Regresi Simultan (F)	58
4.6 Hasil Uji Hipotesis.....	59
4.6.1Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t).....	59
4.7 Pembahasan Hasil Penelitian	60
4.7.1Pengaruh Kepemilikan Institusional (X1) Terhadap <i>Tax Avoidance</i> ..	61
4.7.2Pengaruh Komisaris Independen (X2) Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	62
4.7.3Pengaruh Kualitas Audit (X3) Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	64
4.7.4Pengaruh Komite Audit (X4) Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	65
BAB V PENUTUP.....	67
5.1 Kesimpulan	67
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	68
5.3 Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN.....	74

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2021-2023	2
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	20
Tabel 3. 1 Definisi Operasional.....	37
Tabel 4. 1 Kriteria pengambilan sampel	45
Tabel 4. 2 Uji Deskriptif Sebelum Penghilangan Data <i>Outlier</i>	46
Tabel 4. 3 Uji Deskriptif Setelah Penghapusan Data <i>Outlier</i>	47
Tabel 4. 4 Hasil Uji Normalitas.....	50
Tabel 4. 5 Hasil Uji Normalitas Setelah <i>Outlier</i>	51
Tabel 4. 6 Hasil Uji Multikolinieritas	52
Tabel 4. 7 Hasil Uji Autokorelasi.....	53
Tabel 4. 8 Hasil Uji Autokorelasi Setelah Cochrane Orcutt.....	54
Tabel 4. 9 Hasil Uji Heteroskedastisitas Menggunakan Uji Glejser	55
Tabel 4. 10 Uji Regresi Linier Berganda.....	55
Tabel 4. 11 Hasil Uji Determinasi (R^2).....	57
Tabel 4. 12 Hasil Uji Signifikansi Simultan.....	58
Tabel 4. 13 Hasil Uji Signifikan t.....	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian	31
---------------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia penerimaan pajak itu, salah satu pendapatan yang diinginkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendukung pertumbuhan ekonomi pada setiap daerah, suatu masalah pada tinggi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam perusahaan terhadap kewajiban perpajakan yang menjadi akibat tidak tercapainya penerimaan pajak di suatu negara. Reformasi perpajakan terus berlanjut dari sisi administrasi ataupun kebijakan untuk menciptakan suatu sistem pajak yang adil, efektif, sehat, dan akuntabel. Dalam kepatuhan wajib pajak yang meningkat dan menjadi kunci kepercayaan atas pengelolaan APBN, kepatuhan pajak menjadi sebuah kunci menjaga keuangan negara yang membantu pembangunan nasional dan kesejahteraan sosial. Suatu kontribusi mencapai pendapatan negara yang bersumber dari penerimaan perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pendapatan hibah (KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 2023).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yaitu kontribusi wajib yang diberikan masyarakat negara untuk wajib pajak baik orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa sesuai dengan undang-undang dan akan mendapatkan imbalan baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Tabel 1. 1 Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2021-2023

Tahun	Penerimaan perpajakan	Penerimaan bukan pajak	Hibah	Jumlah
2021	1.547.841,10	458.493,00	5.013,00	2.011.347,10
2022	2.034.552,50	595.594,50	5.696,10	2.635.843,10
2023	2.118.348,00	515.800,90	3.100,00	2.637.248,90

Sumber data: Badan Pusat Statistik dalam miliar rupiah

Berdasarkan tabel di atas terdapat penerimaan pajak tahun 2021-2023 dimana penerimaan pajak yang semakin meningkat di setiap tahunnya. Hal tersebut yang membuat pemerintah mengupayakan penerimaan pajak, karena untuk mewujudkan kesejahteraan umum negara. Perusahaan itu salah satu entitas bisnis yang berkontribusi dalam perpajakan ini, namun menurut perusahaan pajak itu beban yang hendak merugikan perusahaan karena dapat mengurangi laba perusahaan. Hal ini yang bisa menjadi perbedaan prioritas antara pemerintah dan perusahaan. Pemerintah atau Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai pemangku kepentingan (principal) yang menginginkan pendapatan pajak yang besar dan perusahaan sebagai agen yang menginginkan pembayaran pajak yang sedikit. Sehingga mengakibatkan tindakan *tax avoidance* yang dimana wajib pajak berkeinginan untuk menurunkan jumlah pajak yang harus dibayarkan dan dapat memaksimalkan labanya (Pratomo & Rana, 2021).

Tax avoidance ini bukan tindakan pelanggaran undang-undang perpajakan, karena dimana wajib pajak berusaha untuk meminimalkan beban pajak dengan cara legal dengan cara mencari celah dari peraturan perpajakan itu (Lestari & Ovami,

2020). *Tax avoidance* itu salah satu cara wajib pajak memanfaatkan celah hukum agar dapat meminimalkan pajak yang dibayar. Menurut (Dewi, 2019) *tax avoidance* itu strategi meminimalisir beban pajak yang agresif karena dapat menimbulkan resiko denda ataupun dapat membuat reputasi perusahaan yang buruk dimata publik.

Setiap perusahaan pasti memiliki kepentingan yang berbeda-beda keterlibatannya dalam melaksanakan tindakan *tax avoidance*. Meskipun strategi *tax avoidance* ini dapat dianggap sebagai salah satu cara untuk mengurangi beban pajak perusahaan, namun tindakan ini menunjukkan adanya pengungkapan informasi yang kurang transparan kepada investor sehingga menciptakan asimetri informasi yang dapat mengganggu kepercayaan. Manipulasi laporan keuangan yang terjadi dari upaya *tax avoidance* dapat mencerminkan perilaku manajer yang lebih mementingkan pribadi dibandingkan pada kepentingan perusahaan secara menyeluruh. Hal tersebut berpotensi untuk merusak keberlangsungan jangka panjang perusahaan dan hubungan dengan para pemegang saham (Karima Anisa Safitri, 2020).

Salah satu kasus tindakan *tax avoidance* yang terungkap dari PT Adaro Energy tahun 2019. Dimana PT Adaro dikabarkan sudah mengalihkan keuntungan di batubara yang diperoleh Indonesia. Namun, dalam laporan PT Adaro mengalihkan banyak dana ke tempat yang bebas dari pajak tahun 2009-2017. Praktik ini terindikasi dilakukan oleh manajemen PT Adaro Energy dengan memperluas jaringan perusahaan di luar negeri (*transfer pricing*), khususnya negara suaka pajak untuk memanfaatkan regulasi pajak yang lebih longgar dan

memungkinkan perusahaan untuk menyimpan dana serta aset mereka di luar negeri (Prasetyo and Primasari, 2021). Aktivitas ini merupakan kasus dari praktik *tax avoidance* karena sistem *corporate governance* yang buruk oleh karena itu, terjadinya perbedaan kepentingan dan kurangnya pengawasan di internal perusahaan.

Tax avoidance dilakukan dalam pemanfaatan celah dalam peraturan perpajakan. Sehingga diperlukannya sesuatu yang dapat mencegah tindakan *tax avoidance* ini salah satunya melalui adanya pengawasan tata kelola perusahaan atau *corporate governance*. Menurut (Fiska & Rusdi, 2020) kasus di atas ini memerlukan sistem untuk penerapan *corporate governance* yang efektif dalam perusahaan untuk menjadi batas yang jelas antara kepentingan perusahaan dan kepentingan individu sehingga diharapkan mampu mengurangi masalah agensi dan menekan praktik *tax avoidance*. *Corporate governance* bertugas untuk mengawasi kinerja manajemen, maka *corporate governance* menjadi berarti dalam perusahaan dan dapat mendorong agar lebih patuh dengan pembayaran pajak.

Corporate governance atau tata kelola perusahaan yaitu semua peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, manajemen, kreditur, pemerintah, karyawan, dan pihak kepentingan lainnya baik dari internal maupun eksternal. Aturan ini untuk menetapkan hak dan kewajiban berbagai pihak sehingga terbentuk sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan (Marlinda et al., 2020). *Corporate governance* digunakan untuk mencegah agen untuk melakukan usaha yang agresif dalam pengelolaan beban pajak perusahaan (Jusman & Nosita, 2020). Menurut (A. Putri & Lawita, 2019) mengatakan bahwa *corporate*

governance merupakan suatu sistem di perusahaan yang dapat diarahkan dan diawasi. Penerapan baik *corporate governance* dalam sebuah perusahaan itu melaksanakan aktivitas operasional perusahaan dan selain itu juga memiliki kemakmuran perusahaan serta pemegang sahamnya, sehingga penerapannya diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara keseluruhan untuk perusahaan.

Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* dalam *corporate governance* diantaranya yaitu kepemilikan institusional, komisaris independen, kualitas audit dan komite audit.

Kepemilikan institusional itu sebuah kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi baik pemerintah, perusahaan asuransi, investor asing ataupun bank. Kepemilikan institusional itu persentase saham di perusahaan baik yang dimiliki oleh perusahaan lain dengan meningkatkan pengawasan perusahaan agar lebih optimal (Suciati & Wulandari, 2022). Kepemilikan institusional itu saham dimiliki oleh institusi dan tingginya tingkat kepemilikan institusional suatu lembaga atau institusi akan melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap kinerja manajemen, karena dari pengawasan ini dapat mencegah tindakan yang oportunistik para manajer perusahaan (Marlinda et al., 2020).

Menurut (Ginting & Kartika, 2023) dan (Nuramal et al., 2023) menjelaskan dimana kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* dan kepemilikan institusional itu berperan penting dalam pengawasan kinerja manajer agar lebih optimal. Sedangkan penelitian dari (Henti Nurhaliza, 2023) mengatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Komisaris Independen itu bagian dari dewan komisaris independen, dimana berperan untuk pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan direksi supaya mencapai hasil kinerja yang maksimal sesuai dengan kepentingan pemegang saham (Nurhaliza & Sari, 2023). Di lingkup perusahaan komisaris independen dilarang memiliki hubungan secara pribadi antara *stakeholders* atau jajaran direksi lain karena tugas dari komisaris independen yaitu memantau strategi pengelolaan pajak yang dilaksanakan pihak manajemen dan meminimalisir aktivitas *tax avoidance*. Diharapkan komisaris independen ini dapat memenuhi syarat transparansi, akuntabel, adil, dan bertanggung jawab baik terhadap pemegang saham maupun pemangku kepentingan lainnya (Rusdiani & Umaimah, 2023).

Dalam penelitian (Fadilah et al., 2021) menjelaskan dimana komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* karena semakin efektif komisaris independen dalam perusahaan maka semakin bisa menjalankan peran dalam mengendalikan tindakan manajemen yang berkaitan dengan pada oportunistik manajer. Komisaris independen bukan hanya untuk memenuhi peraturan yang berlaku, namun juga untuk melaksanakan pengawasan terhadap manajemen agar tidak melaksanakan praktik *tax avoidance*. Berbeda dengan studi yang telah dilakukan (Marlinda et al., 2020) menjelaskan bahwa dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* karena tidak semua komisaris independen mampu mempertahankan sikap independensinya sehingga peran pengawasan komisaris tidak berjalan dengan maksimal. Selain itu kurangnya pengetahuan latar belakang bisnis juga akan berdampak pada kinerja

pengawasan komisaris independen sehingga sering menyebabkan kegagalan strategi perusahaan yang terkait dengan perpajakan.

Kualitas audit itu sesuatu yang terbentuk jika auditor bekerja menganalisis laporan keuangan klien atau perusahaan. Auditor memiliki tanggung jawab dalam menyusun laporan keuangan secara transparan (Mira & Purnamasari, 2020). Dalam penelitian (Ginting & Kartika, 2023) menyatakan kualitas audit yaitu laporan yang dihasilkan auditor setelah memeriksa laporan keuangan berdasarkan kesalahan dalam laporan keuangan perusahaan. Hal tersebut ditegaskan oleh penelitian (Fiska & Rusdi, 2020) dimana kualitas audit yang transparan dipercayai dengan pengungkapan laporan keuangan yang akurat dan dari banyak penelitian menyatakan laporan yang diaudit oleh auditor dari Kantor Akuntan Publik (KAP) *the big four* memiliki kualitas yang lebih tinggi dibandingkan KAP *non the big four*.

Dalam penelitian (Fitrianingsih & Wulandari, 2024) dan (Mira & Purnamasari, 2020) menyatakan bahwa kualitas audit memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance* karena semakin baik kualitas audit suatu perusahaan maka tindakan *tax avoidance* akan semakin rendah. Berbeda dengan penelitian (Fiska & Rusdi, 2020) yang menyatakan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena perusahaan yang di audit oleh KAP *the big four* tidak berperan terhadap *tax avoidance*.

Komite audit itu sebuah komite pengawas yang berbentuk yang diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris dalam melaksanakan proses pemeriksaan terhadap pelaksanaan fungsi dan tugas direksi untuk mengatur perusahaan. Jumlah komite audit perusahaan akan mempengaruhi transparansi hasil laporan keuangan

dan memastikan laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, sehingga komite audit dapat meminimalisir praktik *tax avoidance* (Fadilah et al., 2021). Adanya komite audit ini berfungsi untuk meningkatkan integritas dan kredibilitas laporan keuangan supaya bisa berjalan dengan baik dan tindakan laporan keuangan yang menyimpang dapat dihindari oleh perusahaan (Jusman & Nosita, 2020). Hal ini selaras dengan penelitian (Marlinda et al., 2020) komite audit akan melaksanakan pengawasan dengan maksimal untuk menjaga kredibilitas dan integritas laba perusahaan dalam laporan keuangan yang dikeluarkan agar tidak salah dan sesuai standar akuntansi.

Dalam penelitian (Fadilah et al., 2021) dan (Nuramal et al., 2023) menyatakan dimana komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance* karena komite audit berperan sebagai penghubung komunikasi dan koordinasi auditor internal dengan auditor eksternal, selain itu komite audit berhubungan dengan audit tentang risiko dan kepatuhan perusahaan dalam laporan keuangan. Penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh (Jusman & Nosita, 2020) menghasilkan dimana komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* karena pada risetnya banyak anggota komite audit tak berperan dalam praktik *tax avoidance* perusahaan sehingga tidak mempengaruhi perilaku perusahaan dalam menghadapi pajak yang harus dibayarkan.

Berdasarkan penelitian di atas masih terdapat ketidak konsistenan, sehingga diperlukan untuk melakukan penelitian kembali. Penelitian ini mengacu pada penelitian (Nurhaliza & Sari, 2023) dengan mengganti variabel *capital intensity* dengan variabel kualitas audit dan komite audit. Alasan mengganti variabel *capital*

intensity dengan variabel kualitas audit dan komite audit karena variabel *capital intensity* tidak termasuk dalam kategori *corporate governance* dan dalam penelitian ini ingin fokus dalam penelitian *corporate governance* terhadap *tax avoidance*. Karena dengan *corporate governance* maka perusahaan akan lebih diawasi oleh tata kelola perusahaan dan dapat meminimalisir tindakan *tax avoidance*. Penelitian ini menggunakan objek penelitian perusahaan sektor energy yang terdaftar di BEI dipilih dalam objek penelitian, karena perusahaan sektor energy ini menjual berbagai produk dan jasa yang terkait dengan ekstraksi energi bumi seperti minyak bumi, gas alam, batu bara yang dimana sektor ini berkontribusi besar pada penerimaan negara. Tak lain juga sektor energy ini merupakan sektor yang strategis untuk kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto dan penerimaan pajak negara, maka sektor ini dapat menjadi salah satu sektor yang tingkat *tax avoidance* tinggi. Tahun yang digunakan yaitu 2021-2023, karena fluktuasi harga pada komoditas energi dampak dari masa pasca pandemi covid-19 hingga menjadi berdampak pada tingkat penghindaran pajak atau *tax avoidance*.

1.2 Rumusan Masalah

Dari suatu fenomena yang telah terjadi terdapat banyak kasus dalam pengendalian pajak yang terjadi khususnya di negara Indonesia. Tindakan *tax avoidance* jika terus dilakukan akan terdapat banyak dampak yang terjadi salah satunya dampak ekonomi pendapatan negara dan akan menciptakan ketidakadilan persaingan bisnis dan merusak reputasi nilai perusahaan. Dengan banyaknya kasus penghindaran pajak sudah banyak diteliti sebelumnya namun terdapat hasil yang tidak konsisten, sehingga penelitian ini menguji bagaimana pengaruh kepemilikan

institusional, kepemilikan independen, kualitas audit dan komite audit terhadap *tax avoidance*.

1.3 Pertanyaan penelitian

Dari penjelasan rumusan masalah tersebut, dapat ditarik kesimpulan pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *tax avoidance* pada *company* sektor energy?
- b. Bagaimana pengaruh Komisaris Independen terhadap *tax avoidance* pada *company* sektor energy?
- c. Bagaimana pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance* pada *company* sektor energy?
- d. Bagaimana pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* pada *company* sektor energy?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjabaran dalam rumusan masalah maka penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen, kualitas audit dan komite audit terhadap *tax avoidance*.

1. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada *company* sektor energy.
2. Untuk menganalisis pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance* pada *company* sektor energy.
3. Untuk menganalisis pengaruh kualitas independen terhadap *tax avoidance* pada *company* sektor energy.

4. Untuk menganalisis pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* pada *company* sektor energy.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan diatas, maka penelitian ini manfaat yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pada peneliti yang lain atau civitas akademis yang akan mengembangkan penelitian maupun pemahaman yang mendalam terkait dengan variabel Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Kualitas Audit dan Komite Audit dalam penggunaan atau pelaksanaan tindakan *Tax avoidance* yang khususnya terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode tahun 2021-2023.

2. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini dapat digunakan untuk membantu perusahaan dalam mengambil keputusan serta untuk memberikan gambaran cara menghindari aktivitas penghindaran pajak dan perusahaan dapat mendorong kepatuhan pajak dalam meningkatkan transparansi keuangan dan melaksanakan pengawasan dengan baik dan besar.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Agency Theory

Teori Agensi pertama kali dikemukakan oleh (Jensen, C., & Meckling, 1976) yang menjelaskan bahwa hubungan antara pemberi kuasa (*prinsipal*) dan orang yang diberi kuasa (*agent*) itu sebuah kesepakatan kerja, dimana manajemen bertugas mengelola kepentingan *principal* berdasarkan kesepakatan yang telah di setujui kesepakatan itu mengatur tentang hak dan kewajiban setiap pihak untuk mencapai manfaat optimal di kedua belah pihak dengan mencapai tujuan yang sama, maka *agent* akan bertindak sesuai dengan keinginan *prinsipal*. Namun pada prakteknya *agent* bekerja untuk membuat dirinya mendapatkan keuntungannya sendiri dalam bentuk meningkatkan gaji atau tunjangan dan kerjasama akan menimbulkan konflik perbedaan tujuan yang memiliki kepentingan berbeda antara *principal* dan *agent* hal tersebut memunculkan asimetri informasi sehingga menjadikan perbedaan kepentingan terhadap dua belah pihak. Menurut (Jayanti, 2024) penelitian ini, *prinsipal* berharap *agent* dapat membuat laporan keuangan yang menguntungkan *prinsipal*, sehingga *agent* dapat memaksimalkan laba dengan meminimalkan pajaknya dengan *tax avoidance* yang dilakukan *agent* dalam mengatur laporan keuangan yang dialokasikan sehingga beban yang dibayarkan tidak dibayarkan sepenuhnya. Dimana suatu perusahaan sebagai *agent* dan pemerintah sebagai *prinsipal*. *Teory agency* ini dapat diasumsikan *agent* yang dapat mensejahterakan individunya atau perusahaannya sendiri sehingga dalam teori

agensi ini *corporate governance* dapat menjadi alat pengawasan dalam mengurangi permasalahan keagenan, dan memastikan *agent* melakukan tindakan yang sesuai kepentingan pada prinsipal. Dengan penguatan tata kelola (*Corporate governance*) ini suatu perusahaan diharapkan dapat mengurangi tindakan oportunistik seperti *tax avoidance* yang berlebihan. Perilaku oportunistik ini dilakukan dengan cara memaksimalkan keuntungan perusahaan untuk memperoleh imbalan maksimal atas kinerja yang dicapai dalam pengelolaan perusahaan (WIDODO & SARTIKA WULANDARI, 2021).

2.2 Variabel-Variabel Penelitian

2.2.1 *Tax avoidance*

Pajak merupakan pembayaran wajib yang harus diberikan terhadap negara baik dari individu maupun badan usaha yang sudah di atur dalam undang-undang tanpa imbalan yang didapatkan langsung, namun hasil dari iuran wajib itu dialokasikan untuk membiayai pengeluaran negara demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pajak yang harus dibayarkan itu dilihat sebagai beban oleh perusahaan, sehingga manajemen sering mengambil langkah *tax avoidance* (penghindaran pajak) dengan harapan dapat mengoptimalkan keuntungan yang akan diperoleh perusahaan (A. A. Putri & Lawita, 2019).

Tax avoidance atau biasa disebut dengan penghindaran pajak di sebuah perusahaan dimana perusahaan ingin meminimalisir pembayaran pajak dalam sebuah perusahaan. *Tax avoidance* adalah meminimalisir beban pajak untuk memaksimalkan laba dengan memanfaatkan celah peraturan perundang-undangan, sehingga penghindaran pajak ini dapat dianggap legal karena tak melanggar

undang-undang (Nurhaliza and Sari, 2023). Walaupun dalam *tax avoidance* ini dikatakan tindakan legal tanpa melanggar hukum yang telah ditetapkan, namun pajak sendiri menjadi sumber penerimaan paling besar bagi negara. Dana penerimaan pajak yang telah diperoleh itu dimanfaatkan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran negara termasuk pengeluaran rutin, fasilitas-fasilitas hingga pembangunan negara. Pengukuran *tax avoidance* dalam penelitian ini *tax avoidance* diukur dengan menggunakan rasio CETR (*Cash Effective Tax Rate*). Rasio ini dihitung dengan membagi jumlah pajak pembayarkan dengan laba sebelum pajak sebagai berikut rumusnya.

$$\text{CETR} = \frac{\text{Penerimaan Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

2.2.2 *Corporate governance*

Corporate governance atau biasa disebut tata kelola perusahaan menurut Widia Anisa Putri (2023) merupakan sebuah aturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, manajemen, kreditor, pemerintah, karyawan, dan stakeholder baik dari internal maupun eksternal yang memiliki hak dan kewajiban setiap pihak. Implementasi suatu tata kelola ini diharapkan dapat meminimalisir adanya kesalahan ataupun tindakan kecurangan dalam proses manajerial, sehingga aktivitas operasional perusahaan dapat berlangsung dengan optimal sehingga mencapai hasil kinerja yang memuaskan dengan suasana kerja yang kondusif.

Tax avoidance atau penghindaran pajak dapat dicegah dengan beberapa cara salah satunya dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan tata kelola perusahaan ini memiliki peran atau tugas untuk membatasi masalah pribadi ataupun manajemen. Pada penelitian ini *corporate governance* yang akan diteliti

diantaranya yaitu Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Kualitas Audit dan Komite Audit.

2.2.2.1 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Institusional merupakan saham perusahaan yang dimiliki institusi seperti institusi pemerintah, bank, asuransi, *company* baik dalam dan luar negeri. Adanya kepemilikan institusional ini dapat mendorong penguatan pengawasan terhadap kinerja manajemen sehingga perusahaan lebih optimal (Suciati & Wulandari, 2022). Kepemilikan Institusional juga memiliki peran yang berarti pada suatu perusahaan karena keberadaan investor institusional atau kepemilikan yang dimiliki pihak eksternal dapat meningkatkan tingkat pengawasan terhadap manajemen sehingga berpotensi untuk mengurangi tindakan manajemen untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Selain itu, kepemilikan institusional berperan untuk memantau dan mengendalikan potensinya konflik kepentingan dalam manajemen dan pemegang saham tersebut (Pratomo & Rana, 2021).

Menurut (Lestari & Ovami, 2020) dalam (Jayanti, 2024) kepemilikan institusional dapat dihitung menggunakan angka rasio yang mutlak dengan perbandingan jumlah saham institusional dengan seluruh modal saham yang beredar. Institusi yang memiliki kepemilikan saham dengan jumlah yang jumlah besar diatas 5%, maka dikatakan memiliki potensi pengawasan yang lebih kuat terhadap kinerja manajemen karena pengaruh dan keterlibatannya dalam pengambilan keputusan perusahaan.

Menurut studi riset yang sudah dilakukan oleh (Nurhaliza & Sari, 2023), (Dewi, 2019), (Marlinda et al., 2020), (Zainuddin & Anfas, 2021), (W. A. Putri &

Halmawati, 2023) kepemilikan institusional dapat diukur menggunakan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah Saham Institusional}}{\text{Jumlah saham yang Beredar}}$$

2.2.2.2 Komisaris Independen

Dewan komisaris independen yaitu anggota dewan yang tidak memiliki hubungan dengan pemegang saham pengendali, direksi ataupun komisaris lainnya (Nurhaliza & Sari, 2023). Komisaris independen memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan perusahaan dalam seluruh pelaksanaan yang dilakukan tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku (Dewi, 2019). Menurut (Subekti & Amin, 2018) adanya komisaris independen dalam sebuah struktur perusahaan ini diharapkan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan dalam pelaporan pajak dan memastikan aktivitas perusahaan dan pelaksanaan kegiatannya tidak melanggar hukum maupun ketentuan yang ditetapkan. Semakin banyak jumlah dewan komisaris independen maka semakin banyak pengawasan yang dilakukan terhadap manajemen dan akan lebih ketat pengawasan manajemen dalam bertindak sehingga akan berhati-hati untuk mengambil keputusan dalam aktivitas perusahaan dan menekan pengurangannya tindakan *tax avoidance* (Pratomo & Rana, 2021).

Peraturan pada Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33/04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dijelaskan bahwa setiap emiten atau perusahaan publik wajib memiliki komisaris Independen paling sedikit 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris dan Komisaris

Independen merupakan anggota dewan komisaris yang berasal dari eksternal perusahaan dan telah memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan ketentuan.

Menurut studi riset yang sudah dilakukan oleh (Nurhaliza & Sari, 2023), (Prasetyo and Primasari 2021), (Dewi, 2019), (Marlinda et al., 2020b), (Rospitasari & Oktaviani, 2021), (Fadilah et al., 2021b) dan (Rusdiani & Umaimah, 2023) komisaris independen dapat diukur menggunakan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Anggota Dewan Komisaris}}$$

2.2.2.3 Kualitas Audit

(Rombebunga & David, 2019) dalam (Ginting & Kartika, 2023) menyatakan bahwa kualitas audit adalah hasil pemeriksaan auditor terhadap laporan keuangan yang bertujuan untuk menilai adanya kemungkinan terjadinya kesalahan ataupun pelanggaran dalam penyajian laporan tersebut. Kualitas audit berperan penting untuk mencegah *tax avoidance* dimana perusahaan mendukung transparansi yang menjadi prinsip utama penerapan *corporate governance* yang bergantung dengan prinsip transparansi, khususnya dalam pelaporan perpajakan kepada pemegang saham dan otoritas publik (Sartori, 2010) dalam (Fiska & Rusdi, 2020).

Kualitas audit ini mampu mengurangi permasalahan keagenan antara manajemen dan pemegang saham, termasuk dalam pengambilan keputusan terkait *tax avoidance* (Jusman & Nosita, 2020). Pengukuran kualitas audit di suatu perusahaan dilakukan dengan melihat apakah Kantor Akuntan Publik (KAP) yang digunakan tergolong dalam kelompok tertentu. KAP itu merupakan lembaga resmi yang menaungi profesi auditor dan terdaftar dibawah naungan Kementerian

Keuangan yang umumnya dibedakan menjadi 2 kategori yaitu KAP *Big Four* dan KAP yang tidak terafiliasi dengan *Big Four* (Rospitasari & Oktaviani, 2021). Agar memperoleh kualitas audit yang lebih tinggi, perusahaan biasanya memilih auditor yang berasal dari KAP *The Big Four*, karena hasil audit dari KAP *Big Four* lebih kredibel dan tingginya kredibilitas laporan keuangan itu dapat membantu kemungkinan terjadinya praktik *tax avoidance* (Putri and Halmawati 2023).

Menurut studi riset yang sudah dilakukan oleh (Fitrianingsih & Wulandari, 2024), (Jusman & Nosita, 2020), (Rospitasari & Oktaviani, 2021), (Ginting & Kartika, 2023), (Putri and Halmawati 2023) dan (Rusdiani & Umaimah, 2023) kualitas audit dapat diukur menggunakan variabel *dummy*, dimana perusahaan yang menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) *Big Four* akan diklasifikasikan dengan nilai 1, apabila perusahaan yang tidak menggunakan jasa KAP *Big Four* akan mendapatkan nilai 0.

2.2.2.4 Komite Audit

Komite audit merupakan suatu komite yang dirancang oleh dewan komisaris, dimana anggotanya dapat ditentukan melalui pengangkatan dan pemberhentian oleh dewan komisaris yang dimana tugasnya yaitu mendukung proses pengawasan terhadap kinerja direksi dalam menjalankan fungsi pengelolaan perusahaan (Fiska & Rusdi, 2020). Berdasarkan pasal 4 POJK No.55/POJK 04/2015 struktur keanggotaan komite audit yaitu komite audit harus memiliki setidaknya 3 (tiga) anggota yang terdiri dari komisaris independen serta individu-individu yang berasal dari luar entitas emiten atau perusahaan publik (*Otoritas jasa keuangan republik indonesia*, 2015).

Dalam penelitian (Dewi, 2019) menjelaskan tugas dalam komite audit memiliki tanggung jawab dalam mengawasi laporan keuangan sehingga perannya dapat pengaruh dalam *tax avoidance*. (Marlinda et al., 2020) menyatakan bahwa dalam Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) komite audit itu sebuah organisasi yang menjalankan tugasnya secara ahli tanpa keberpihakan (*independen*) dan tugasnya mendukung dewan komisaris untuk melakukan pengendalian terhadap proses pelaporan keuangan, pengelolaan risiko, pelaksanaan audit dan prinsip *corporate governance* di perusahaan. Jumlah anggota komite audit dalam perusahaan dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan, karena keberadaan komite audit ini dapat meningkatkan transparansi serta memastikan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Sehingga kehadiran komite audit dapat mengurangi praktik *tax avoidance* oleh perusahaan (Fadilah et al., 2021).

Menurut studi riset yang sudah dilakukan oleh (Dewi, 2019), (Marlinda et al., 2020b), (Pratomo & Rana, 2021), (Jusman & Nosita, 2020), (Rospitasari & Oktaviani, 2021), (Hidayah & Puspita, 2024), (Purbowati, 2021), dan (Rusdiani & Umaimah, 2023) komite audit dapat diukur menggunakan perhitungan sebagai berikut:

$$KA = \sum \text{komite audit}$$

2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Variabel, Metode Analisis, dan Alat Ukur	Hasil Penelitian
1.	(Nurhaliza & Sari, 2023)	<p>Variabel Dependen: <i>Tax avoidance</i></p> <p>Variabel Independen: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Institutional Ownership</i> - <i>Independent Commissioners</i> - <i>Capital Intensity</i> </p> <p>Metode Analisis: Analisis deskriptif dan analisis regresi data panel</p> <p>Data Sampel: Perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi dasar yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021 terdapat 120 sampel.</p>	<p>1. <i>Institutional Ownership</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i></p> <p>2. <i>Independent Commissioners</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i></p> <p>3. <i>Capital Intensity</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i></p>
2.	(Rospitasari & Oktaviani, 2021)	<p>Variabel Dependen: <i>Tax avoidance</i></p> <p>Variabel Independen:</p>	<p>1. Komite Audit berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i></p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Komite Audit - Komisaris Independen - Kualitas Audit <p>Metode Analisis: Analisis regresi data panel</p> <p>Data Sampel: Perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI periode tahun 2017-2020 terdapat 64 sampel.</p>	<p>2. Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i></p> <p>3. Kualitas Audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i></p>
3.	(Rusdiani & Umaimah, 2023)	<p>Variabel Dependen: <i>Tax avoidance</i></p> <p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komisaris Independen - Komite Audit - Kualitas Audit <p>Metode Analisis: Analisis regresi linier berganda.</p> <p>Data Sampel:</p>	<p>1. Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i></p> <p>2. Komite Audit berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i></p> <p>3. Kualitas Audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i></p>

		Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode tahun 2018-2020 terdapat 78 sampel.	
4.	(Jusman & Nosita, 2020)	<p>Variabel Dependen: <i>Tax avoidance</i></p> <p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kualitas Audit - Komite Audit - <i>Capital Intensity</i> - ROA <p>Metode Analisis: Analisis regresi linier</p> <p>Data Sampel: Perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode tahun 2016-2018 terdapat 63 sampel.</p>	<p>1. Kualitas Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i></p> <p>2. Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i></p> <p>3. <i>Capital Intensity</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i></p> <p>4. <i>Return On Assets</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i></p>
5.	(Marlinda et al., 2020b)	<p>Variabel Dependen: <i>Tax avoidance</i></p> <p>Variabel Independen:</p>	<p>1. Dewan Komisaris Independen tidak</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Dewan Komisaris Independen - Kepemilikan Institusional - Komite Audit - <i>Profitabilitas</i> - <i>Capital Intensity</i> - Ukuran Perusahaan <p>Metode Analisis: Analisis regresi linier berganda</p> <p>Data Sampel: Perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode tahun 2016-2018 terdapat 63 sampel</p>	<p>berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i></p> <p>2. Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i></p> <p>3. Komite Audit berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i></p> <p>4. <i>Profitabilitas</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i></p> <p>5. <i>Capital Intensity</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i></p> <p>6. Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i></p>
6.	(Fiska & Rusdi, 2020)	<p>Variabel Dependen: <i>Tax avoidance</i></p> <p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komite Audit 	<p>1. Komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i></p> <p>2. Struktur Kepemilikan Institusional</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Struktur Kepemilikan Institusional - Proporsi Komisaris Independen - Kualitas Audit - Profitabilitas <p>Metode Analisis: Analisis regresi linier</p> <p>Data Sampel: Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2016-2018 dan terdapat 216 sampel.</p>	<p>berpengaruh negative signifikan terhadap <i>tax avoidance</i></p> <p>3. Proporsi Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i></p> <p>4. Kualitas Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i></p> <p>5. <i>Profitabilitas</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i></p>
7.	(Ginting & Kartika, 2023)	<p>Variabel Dependen: <i>Tax avoidance</i></p> <p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komisaris Independen - Komite Audit - Kepemilikan Institusional - Kepemilikan Manajerial 	<p>1. Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i></p> <p>2. Komite Audit berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i></p> <p>3. Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Karakter Eksekutif - Kompensasi Eksekutif - Kualitas Audit <p>Metode Analisis: Analisis regresi linier berganda</p> <p>Data Sampel: Perusahaan manufaktur sektor basic material yang terdaftar di BEI periode tahun 2019-2021 terdapat 120 sampel.</p>	<p>signifikan terhadap <i>tax avoidance</i></p> <p>4. Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i></p> <p>5. Karakter Eksekutif tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i></p> <p>6. Kompensasi Eksekutif tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i></p> <p>7. Kualitas Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i></p>
8.	(Fadilah et al., 2021)	<p>Variabel Dependen: <i>Tax avoidance</i></p> <p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komite Audit - Dewan Komisaris - Intensitas Modal 	<p>1. Komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i></p> <p>2. Dewan komisaris independen berpengaruh</p>

		<p>Metode Analisis:</p> <p>Analisis regresi linier berganda</p> <p>Data Sampel:</p> <p>Perusahaan keuangan yang terdaftar BEI periode tahun 2015-2019 terdapat 163 sampel.</p>	<p>negatif terhadap <i>tax avoidance</i></p> <p>3. Intensitas modal tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i></p>
9.	(Nuramal et al., 2023)	<p>Variabel Dependen:</p> <p><i>Tax avoidance</i></p> <p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komisaris Independen - Kepemilikan Institusional - Komite Audit - Kualitas Audit <p>Metode Analisis:</p> <p>Analisis regresi linier berganda</p> <p>Data Sampel:</p> <p>Perusahaan manufaktur sektor industri barang</p>	<p>1. Komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i></p> <p>2. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i></p> <p>3. Komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i></p> <p>4. Kualitas audit berpengaruh negatif</p>

		konsumsi yang terdaftar di BEI periode tahun 2020- 2021 terdapat 42 sampel.	tidak signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>
--	--	---	---

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax avoidance*

Faktor dalam *corporate governance* salah satunya yaitu kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional itu porsi saham suatu perusahaan yang dimiliki oleh institusi, kepemilikan institusional ini memegang peran penting dalam perusahaan karena keberadaan pemegang saham dari kalangan institusi (pihak eksternal) dapat meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap kinerja manajemen. Kepemilikan institusional ini berfungsi sebagai mekanisme kontrol untuk meminimalisir munculnya benturan kepentingan diantara manajemen dan para pemegang saham (Pratomo & Rana, 2021). Berdasarkan teori agensi terdapat interaksi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam perusahaan. Dimana pada masing-masing memiliki tujuan individu yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan untuk meminimalkan resiko tersebut, maka perusahaan perlu mencegah dengan menghadirkan pengawas eksternal yang bertugas untuk memantau dan mengawasi tindakan dari setiap pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda (Fiska & Rusdi, 2020). Hasil temuan yang dilaksanakan dari (Nuramal et al., 2023) dan (Ginting & Kartika, 2023) menerangkan bahwasannya kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Karena semakin tinggi kepemilikan institusional di perusahaan maka

akan semakin tinggi nilai CETR yang didapatkan sehingga rendahnya praktik *tax avoidance* dan lebih tinggi nilai kepemilikan institusional maka mengungkapkan untuk mengantisipasi sesuatu akan lebih akurat dan tepat. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H1: Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *Tax avoidance*

2.4.2 Pengaruh Komisaris Independen terhadap *Tax avoidance*

Komisaris independen ini juga merupakan salah satu faktor dari *corporate governance*. Dewan komisaris independen ini memiliki peran sebagai pengawas untuk memastikan bahwa perusahaan dikelola dengan baik dan laporan keuangan yang disusun secara objektif. Meningkatnya proporsi komisaris independen dalam satu perusahaan akan meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap manajemen sehingga dapat membatasi terjadinya praktik *tax avoidance* (Fadilah et al., 2021).

Berdasarkan teori agen datanya anggota dewan komisaris independen ini dari eksternal company, hal tersebut berfungsi untuk mengontrol kepala perusahaan. Semakin banyak jumlah dewan komisaris independen akan semakin efektif juga pengawasan dan pengendalian aktivitas direksi berhubungan dengan tindakan oportunistik yang mereka lakukan. Hal ini berarti komisaris independen bekerja dengan maksimal dalam melaksanakan pengawasan praktik *tax avoidance* di perusahaan (Fiska & Rusdi, 2020). Keberadaan komisaris independen dalam tatakelola perusahaan ini fungsi utamanya itu memantau kinerja pada manajemen dalam mengambil keputusan dalam perusahaan. Hasil temuan yang dilaksanakan oleh (Lestari & Ovami, 2020) yang menyatakan bahwa dewan komisaris

independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H2: Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *Tax avoidance*

2.4.3 Pengaruh Kualitas Audit terhadap *Tax avoidance*

Kualitas audit salah faktor dari *corporate governance* karena sebagian perusahaan melihat dari sebuah KAP yang digunakan untuk mencerminkan kualitas auditnya. Hasil audit dalam *financial statements* perusahaan yang menggunakan jasa KAP *big four* akan dipercaya dalam tingkat kualitas yang lebih tinggi. Sehingga perusahaan harus memiliki laporan keuangan dengan kualitas audit lebih baik untuk bebas dari dugaan praktik *tax avoidance* (Ginting & Kartika, 2023).

Berdasarkan teori agensi terjadinya konflik kepentingan antara agen dan prinsipal. Dengan kualitas audit yang tinggi atau biasanya dilaksanakan oleh KAP *Big Four* akan menjadi mekanisme pengawasan eksternal yang efektif untuk membatasi perilaku oportunistik manajemen. Audit yang berkualitas dapat meningkatkan keandalan laporan keuangan dan mencegah perilaku yang bisa merugikan prinsipal, salah satunya berupa tindakan *tax avoidance* (Rusdiani & Umaimah, 2023).

Kantor Akuntan Publik (KAP) berkualitas itu akan menerapkan transparansi dalam pelaporan keuangan yang diaudit, dan semakin tinggi kualitas audit suatu perusahaan maka dapat menurunkan tindakan penghindaran pajak. Hasil temuan yang dilaksanakan oleh (Mira & Purnamasari, 2020) menyatakan bahwa kualitas

audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H3: Kualitas Audit berpengaruh negatif terhadap *Tax avoidance*

2.4.4 Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax avoidance*

Komite audit itu merupakan salah satu dari *corporate governance*, karena komite audit yaitu komite yang berperan membantu pengawasan kinerja manajemen dan perusahaan terhadap laporan keuangan yang disusun oleh tim pengelola perusahaan. Jumlah anggota komite audit pada suatu perusahaan memiliki potensi untuk mempengaruhi kualitas laporan keuangan (Fadilah et al., 2021). Jumlah anggota komite audit suatu perusahaan juga dapat mempengaruhi dalam kualitas laporan keuangan. Berdasarkan teori agensi, komite audit terdapat hubungan kontrak antara agen dan prinsipal yang menimbulkan konflik kepentingan sehingga menimbulkan masalah agensi. Masalah agensi ini timbul saat manajemen melakukan kecurangan atau manipulasi dalam penyajian laporan keuangan dengan tujuan untuk menekan beban pajak seminimal mungkin (Rusdiani & Umamah, 2023). Komite audit ini penting dengan wewenang yang dapat mencegah perilaku yang menyimpang terkait laporan keuangan perusahaan termasuk juga meminimalisir terjadinya praktik *tax avoidance* dan target penerimaan pajak agar tercapai secara optimal. Hasil temuan yang dilaksanakan oleh (Nuramal et al., 2023) dimana menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

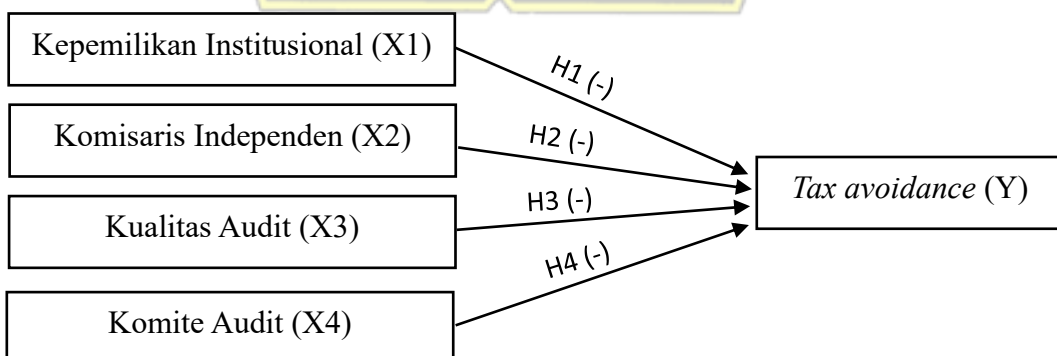
H4: Komite Audit berpengaruh negatif terhadap *Tax avoidance*

2.5 Kerangka Penelitian

Kerangka pemikiran ini disusun untuk menjelaskan pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen berdasarkan padar tinjauan teoritis yang relevan. Sehingga informasi yang terdapat dalam laporan keuangan dapat dimanfaatkan dan digunakan untuk pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance*. Dalam penelitian ini variabel independen meliputi kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, kualitas audit dan komite audit. Dan variabel dependen menggunakan *tax avoidance*.

Pengukuran ini digambarkan untuk menganalisa pengaruh dari *corporate governance* yang diukur dengan kepemilikan institusional, komisaris independen, kualitas audit dan komite audit. Dan variabel dependen menggunakan *tax avoidance*. Dengan kerangka penelitian yang dijabarkan melalui gambar yang ditampilkan sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kuantitatif, yang dimana menurut (Sugiyono, 2022) metode penelitian kuantitatif ini berdasarkan pada filsafat positivisme, yaitu termasuk pada metode penelitian yang ilmiah karena mengikuti prinsip keilmuan seperti berbasis empiris bersifat objektif, dapat diukur, rasional, dan tersusun sistematis. Dalam metode penelitian kuantitatif ini disajikan data dalam bentuk numerik serta dianalisis dengan teknik statistik. Metode ini dapat digunakan untuk meneliti populasi ataupun sampel tertentu yang mengumpulkan data dengan instrumen penelitian, analisis data yang bersifat statistik yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang sudah diterapkan dan penelitian ini akan menguji variabel *Corporate governance* terhadap *Tax avoidance* menggunakan data sekunder yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) pada perusahaan Sektor Energi yang telah *go public*.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi yaitu wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang sudah ditetapkan oleh peneliti agar dapat dipelajari kemudian dapat diambil kesimpulannya (Sugiyono, 2022). Adapun populasi pada penelitian ini yaitu seluruh perusahaan sektor energy yang telah *go public* dalam situs Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021-2023.

3.2.2 Sampel

Menurut (Sugiyono, 2022) sampel yaitu sebagian dari semua keseluruhan populasi yang mencerminkan jumlah dan karakteristik yang dimiliki pada populasi itu, dimana jika populasi terlalu besar maka tidak memungkinkan untuk diteliti secara menyeluruh maka penelitian ini dapat memanfaatkan sampel yang berasal dari populasi tersebut. Penelitian ini menerapkan teknik *purposive sampling*, teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang dapat memberikan informasi sesuai dengan tujuan penelitian. Berikut kriteria yang digunakan untuk menentukan sampel pada penelitian ini, antara lain:

1. Seluruh perusahaan sektor energy yang terdaftar di BEI selama periode pengamatan tahun 2021-2023.
2. Perusahaan sektor energy yang dengan lengkap menyajikan *financial statement* dan *annual report* pada tahun 2021-2023.
3. Perusahaan sektor energy yang memperoleh profit dalam kurun waktu penelitian 2021-2023.
4. Perusahaan sektor energy yang didalamnya menyajikan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan riset.

3.3 Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber informasi. Data sekunder adalah sumber informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari pihak yang mengumpulkan data, dimana biasanya berasal dari dokumen atau sumber lain yang tersusun dalam bentuk dokumen (Sugiyono, 2022). Penelitian ini mengambil sumber dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan sektor energy yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2021-2023 yang sudah memenuhi syarat untuk pengambilan sampel.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yang dimana mengumpulkan data *financial report* dan *annual report* perusahaan sektor energy yang berasal dari situs resmi BEI tahun periode 2021-2023 yang bisa di akses melalui www.idx.co.id. Dengan data yang ingin diperoleh dari variabel penelitian ini diantaranya kepemilikan institusional, kepemilikan independen, kualitas audit dan komite audit terhadap *tax avoidance* selama periode penelitian 2021-2023.

3.5 Variabel Penelitian, Definisi Operasional Variabel dan Indikator

Penelitian ini digunakan dua variabel penelitian, diantaranya variabel independen dan variabel dependen. Dimana variabel independen merupakan variabel bebas, yang dapat mempengaruhi terjadinya perubahan timbulnya variabel dependen. Dan variabel dependen merupakan variabel terikat yang dipengaruhi oleh variabel independen (variabel bebas). Variabel yang terdapat dalam penelitian:

1. Kepemilikan Institusional (Variabel Independen)
2. Komisaris Independen (Variabel Independen)
3. Komite Audit (Variabel Independen)
4. Kualitas Audit (Variabel Independen)
5. *Tax avoidance* (Variabel Dependen)

3.5.1 *Tax avoidance* (Y)

Tax avoidance merupakan strategi yang diterapkan individu atau entitas untuk mengurangi kewajiban pajak dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang lebih besar, namun tidak melanggar peraturan perpajakan atau secara legal (Fiska, Adella, Rusdi, 2020). Strategi ini memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan di suatu negara dan seiring dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara maka semakin meningkat pula jumlah perusahaan ataupun entitas asing yang menanamkan modal pada negara tersebut untuk memperoleh keuntungan yang optimal (A. A. Putri & Lawita, 2019). Rumus pengukuran *Tax avoidance* sebagai berikut:

$$\text{CETR} = \frac{\text{Penerimaan Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Sumber: (Prasetyo et al., 2021)

3.5.2 Kepemilikan Institusional (X)

Kepemilikan Institusional yaitu saham yang dimiliki oleh entitas institusional termasuk pemerintah ataupun swasta. Kepemilikan Institusional ini akan meningkatkan pengendalian yang lebih optimal mengenai kinerja manajemen (Lestari & Ovami, 2020). Kepemilikan Institusional dinyatakan dalam persentase yang diukur dengan cara membandingkan dengan proporsi saham yang dimiliki investor institusional dibagi dengan total saham yang beredar sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah Saham yang dimiliki Institusi}}{\text{Total Saham yang Beredar}}$$

Sumber: (Marlinda et al., 2020)

3.5.3 Komisaris Independen (X)

Komisaris Independen adalah komisaris yang tidak termasuk anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat yang memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas perusahaan, yang bertugas mengawasi pengelolaan suatu perusahaan (Purbowati, 2021). Dalam penelitian ini pengukuran komisaris independen dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Anggota Komisaris Independen}}{\text{Total Anggota Dewan Komisaris}}$$

Sumber: (Marlinda et al., 2020)

3.5.4 Kualitas Audit (X)

Kualitas Audit merupakan laporan keuangan perusahaan yang dibuat auditor setelah pemeriksaan peluang kesalahan atau pelanggaran dalam laporan keuangan. Auditor bertanggung jawab dalam laporan keuangan agar menghasilkan laporan keuangan yang transparan sehingga perusahaan dapat mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan internalnya (Rusdiani & Umaimah, 2023). Rumus dalam penelitian menggunakan pengukuran dengan variabel *dummy*. Perusahaan yang diaudit oleh KAP *big four* akan diberi kode 1, sedangkan perusahaan yang di audit oleh KAP *non big four* akan diberikan kode 0.

Sumber : (Ginting & Kartika, 2023)

3.5.5 Komite Audit (X)

Komite Audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris yang dimana anggotanya bisa ditunjuk dan diberhentikan oleh dewan komisaris yang memiliki tugas dalam mendukung pengawasan terhadap kinerja direksi saat

menjalankan pengelolaan perusahaan (Fiska & Rusdi, 2020). Rumus dalam penelitian menggunakan pengukuran sebagai berikut:

$$\text{KOM} = \sum \text{Komite Audit}$$

Sumber: (Jusman & Nosita, 2020)

Tabel 3. 1 Definisi Operasional

NO.	Variabel	Definisi	Pengukuran
1.	<i>Tax avoidance</i>	<i>Tax avoidance</i> merupakan strategi yang diterapkan untuk mengurangi kewajiban pajak untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, namun tidak melanggar peraturan perpajakan atau dengan cara legal (Fiska, Adella, Rusdi, 2020).	$\text{CETR} = \frac{\text{Penerimaan Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$ <p>Sumber: (Marlinda et al., 2020)</p>
2.	Kepemilikan Institusional	Kepemilikan Institusional yaitu kepemilikan saham yang dimiliki oleh lembaga pemerintah ataupun entitas institusional seperti bank, ataupun perusahaan investasi	$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{JML Saham yang dimiliki Institusi}}{\text{Total Saham yang Beredar}}$ <p>Sumber: (Marlinda et al., 2020)</p>

		(Lestari & Ovami, 2020).	
3.	Komisaris Independen	<p>Komisaris Independen yaitu anggota dewan komisaris yang bukan bagian dari pengelola perusahaan atau seseorang pejabat dengan cara lain yang berhubungan langsung atau tidak dengan pemegang saham mayoritas. Bertugas mengawasi pengelolaan perusahaan (Purbowati, 2021).</p>	<p>Komisaris Independen = $\frac{\text{JML Anggota Komisaris Independen}}{\text{Total Anggota Dewan Komisaris}}$ Sumber: (Marlinda et al., 2020)</p>
4.	Kualitas Audit	<p>Kualitas Audit merupakan laporan keuangan perusahaan yang dibuat auditor setelah pemeriksaan peluang kesalahan atau pelanggaran dalam laporan keuangan. (Ginting & Kartika, 2023)</p>	<p>Dummy : KAP Big Four = 1 KAP Non Big Four = 0</p>

5.	Komite Audit	Komite Audit merupakan komite yang dibentuk dewan komisaris yang dimana anggotanya bisa ditunjuk dan dihentikan oleh dewan komisaris yang memiliki tugas mendukung pengawasan kinerja direksi dalam mengelola perusahaan (Fiska & Rusdi, 2020)	KOM=Σ Komite Audit
----	--------------	--	---------------------------

3.6 Teknik Analisis

Berdasarkan pada rumusan masalah dan hipotesis yang telah diajukan sebelumnya, teknik analisis ini diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan dalam pengujian hipotesis. Pengaruh *Corporate governance* terhadap *Tax avoidance* yang diukur menggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis ini bertujuan untuk memperoleh kesimpulan serta gambaran mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk memudah proses analisis, penelitian ini menggunakan bantuan *Software IBM SPSS Versi 26*.

3.6.1 Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan sebuah jenis statistik yang digunakan untuk menganalisis sebuah data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data

yang sudah terkumpul tanpa adanya keinginan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Dengan uji statistik deskriptif ini terdapat penyajian data tabel perhitungan rata-rata, maksimum, minimum, standar deviasi dan hasil variabel independen kepemilikan institusional, komisaris independen, kualitas audit, komite audit dan variabel dependen *tax avoidance* di perusahaan sektor energy yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021-2023.

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik ini merupakan syarat yang sangat penting untuk melakukan uji regresi linier berganda. Manfaat uji asumsi klasik ini untuk mengetahui bahwa model regresi sudah memenuhi syarat dari asumsi klasik dasar. Asumsi dasar ini meliputi adanya uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Asumsi-asumsi tersebut dikenal dengan istilah BLUE (Best Linear Unbiased Estimator) sebuah keputusan yang diambil dari uji t dan uji F yang tidak dibias, konsisten, akurat dan memenuhi syarat yang valid (Ghozali, 2018).

1. Uji Normalitas

Uji Normalitas ini untuk mengetahui jika model regresi yang dilakukan terdapat variabel residual dan terdapat distribusi normal ataupun tidak. Tujuan dari uji normalitas yaitu uji yang digunakan untuk menguji model regresi dan variabel residual apakah menghasilkan data yang diinginkan (Ghozali, 2018). Metode yang digunakan dalam uji normalitas ini adalah kolmogorov smirnov untuk mendeteksi residualnya normal atau tidak. Dimana jika koefisien signifikan $\alpha > 0,05$ atau 5% maka data berdistribusi normal, jika koefisien $\alpha < 0,05$ atau 5% maka data tidak berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas untuk mendapatkan informasi mengenai ada atau tidaknya korelasi yang signifikan antara variabel independen yang terdapat dalam suatu model regresi (Ghozali, 2018). Metode yang digunakan dalam uji Multikolinieritas ini adalah nilai tolerance dan VIF (Variance Inflation Factor). Apabila tolerance $> 0,10$ maka terdapat indikasi variabel tersebut memiliki Multikolinieritas dan jika Variance Inflation Factor (VIF) < 10 maka tidak terdeteksi adanya Multikolinieritas.

3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi untuk mengevaluasi apakah ada residual saat observasi pada periode berjalan dengan kesalahan tahun sebelumnya pada model regresi linier. Uji ini umumnya terjadi pada deret waktu (time series) karena gangguan pada individu/kelompok dapat mempengaruhi gangguan pada individu/kelompok yang sama di observasi berikutnya (Ghozali, 2018). Metode yang digunakan menggunakan uji Durbin-Watson (DW) dan proses pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi sebagai berikut:

- a. $0 < d < d_l =$ tidak ada autokorelasi positif.
- b. $d_l \leq d \leq d_u =$ tidak ada autokorelasi positif.
- c. $4 - d_l < d < 4 =$ tidak ada autokorelasi negatif.
- d. $4 - d_u \leq d \leq 4 - d_l =$ tidak ada autokorelasi negatif.
- e. $d_u < d < 4 - d_u =$ tidak ada autokorelasi positif atau negatif.

4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas untuk memeriksa model regresi apakah terdapat perbedaan varian residual di seluruh observasi dalam model regresi. Jika varian dari residual ini tetap konstan dapat disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang bagus itu homoskedastisitas dan tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2018). Uji heteroskedastisitas ini menggunakan uji glejser dimana uji ini bertujuan untuk meregresi nilai absolut dari nilai residual. Uji glejser ini terjadi heteroskedastisitas apabila nilai signifikansinya $< 0,05$ atau 5% dan apabila signifikansinya $> 0,05$ atau 5% artinya tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.6.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda yaitu metode statistik yang implementasikan di berbagai seperti bidang ilmu sosial, ekonomi dan kesehatan. Metode ini digunakan untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Adapun persamaan regresinya yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

Y = Variabel dependen (*Tax avoidance*)

α = Konstanta

X_1 = Kepemilikan Institusional

X_2 = Komisaris Independen

X_3 = Kualitas Audit

X_4 = Komite Audit

β = Koefisien regresi

e = Error Term (tingkat terduga penelitian)

3.6.4 Uji Goodness of Fit Model

Uji goodness of fit (uji kelayakan model) sebagai ukuran statistik dengan kemampuan fungsi regresi dalam memperkirakan nilai yang aktual. Dengan secara statistik ini dapat diukur dari nilai koefisien determinasi (R^2), nilai statistik F dan nilai statistik t. Dalam perhitungan statistik dapat diartikan signifikan jika nilai uji statistiknya ini berada di dalam daerah kritis (H_0 ditolak) dan dapat disebut signifikan jika nilai uji statistiknya berada di daerah aman (H_0 diterima).

1. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) ini mengukur berapa jauh kemampuan model untuk menjelaskan variasi didalam variabel dependen. Nilai koefisien determinasi ini diantara 0 dan 1, nilai yang dekati 1 menunjukkan bahwa hampir sepenuhnya model mampu menjelaskan variabel tersebut dan jika nilai menjauhi angka 0 maka model tidak dapat menjelaskan variasi variabel dependen yang baik (Ghozali, 2018).

2. Uji signifikan Simultan (Uji Statistik F)

Menurut (Ghozali, 2018) uji signifikansi simultan (uji F) dimana uji ini digunakan untuk menunjukkan jika semua variabel independen dimasukkan ke

dalam model regresi memiliki pengaruh bersama-sama terhadap variabel dependen.

Kriteria pengujian hipotesis dalam menggunakan uji statistik F sebagai berikut:

- Jika $(\text{Sig.F}) = 0,0000 < 0,05$ atau 5%, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima dan artinya terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.
- Jika $(\text{Sig.F}) = 0,0000 > 0,05$ atau 5%, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak dan artinya tidak terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

3. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji signifikan parameter individual (uji t) uji ini digunakan untuk menguji apakah suatu variabel independen ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap dependen (Ghozali, 2018). Kriteria pengujian hipotesis dalam menggunakan uji statistik t sebagai berikut:

- Jika $\text{sig. T-test} < 0,05$ atau 5% maka H_0 ditolak dan H_1 diterima artinya terdapat pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen.
- Jika $\text{sig. T-test} > 0,05$ atau 5% maka H_0 diterima dan H_1 ditolak artinya tidak terdapat pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini berfokus pada populasi perusahaan sektor energy yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2021-2023. sumber data yang digunakan dalam penelitian berupa data sekunder yang menyajikan *financial statement* dan *annual report* pada setiap perusahaan yang berasal dari halaman web Bursa Efek Indonesia (BEI). Penentuan sampelnya yaitu menggunakan *purposive sampling*, pemilihan sampel ini terdapat kriteria yang sesuai dengan fokus penelitian. Berdasarkan kriteria tersebut jumlah perusahaan sektor energy yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023 adalah 83 perusahaan dengan periode 3 tahun penelitian, sehingga sampel pengamatan adalah 249. Tabel di bawah ini merupakan rincian sampel yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan kriteria yang mendalam.

Tabel 4. 1 Kriteria pengambilan sampel

No	Kriteria	Jumlah
1.	Jumlah sampel sektor energy yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021-2023	249
2.	18 perusahaan sektor energy yang tidak menyajikan <i>financial statement</i> dan <i>annual report</i> selama penelitian periode 2021-2023	(54)
3.	Perusahaan sektor energy yang tidak mengalami laba pada periode 2021-2023	(41)
4.	Perusahaan sektor enery yang tidak menyajikan informasi secara lengkap mengenai pembayaran pajak penghasilan dalam laporan keuangan periode 2021-2023	(45)
	Jumlah sampel penelitian	109
	Data <i>outlier</i>	(20)
	Total data sampel penelitian	89

Sumber : Data Sekunder yang diolah (2025)

4.2 Uji Statistik Deskriptif

Pengujian statistik deskriptif dilaksanakan untuk mengetahui karakter data dengan merincikan beberapa nilai dari variabel dependen maupun independen mengenai nilai minimum, maksimum, mean dan standar deviasi. Hasil dari pengujian statistik deskriptif seperti berikut:

Tabel 4. 2 Uji Deskriptif Sebelum Penghilangan Data *Outlier*

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepemilikan Institusional	109	0,00	0,98	0,6650	0,23083
Komisaris Independen	109	0,33	0,80	0,4403	0,12284
Kualitas Audit	109	0,00	1,00	0,42	0,496
Komite Audit	109	3,00	5,00	3,14	0,440
<i>Tax avoidance</i>	109	0,00	459,21	7,1208	48,03773
Valid N (listwise)	109				

Sumber : Data Output SPSS Versi 26, 2025

Hasil pengujian analisis deskriptif di atas dengan jumlah sampel 109 menghasilkan penulisan penulisan yang tidak normal. Kondisi tersebut mengindikasikan perlunya mengeluarkan beberapa data karena terdapat penyimpangan dari asumsi normalitas, sehingga diperlukan penyesuaian data seperti deteksi *outlier* agar data memberikan dampak yang signifikan dengan data lainnya. Berikut sajian hasil uji statistik deskriptif setelah dilaksanakan *outliers* yang menghasilkan 89 sampel.

Tabel 4. 3 Uji Deskriptif Setelah Penghapusan Data *Outlier*

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepemilikan Institusional	89	0,22	0,98	0,7130	0,18778
Komisaris Independen	89	0,33	0,75	0,4287	0,11690
Kualitas Audit	89	0,00	1,00	0,4045	0,49357
Komite Audit	89	3,00	5,00	3,0337	0,23594
<i>Tax avoidance</i>	89	0,00	0,70	0,2322	0,18728
Valid N (Listwise)	89				

Sumber : Data Output SPSS Versi 26, 2025

Berdasarkan hasil analisis deskriptif pada tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kepemilikan Institusional (X1)

Hasil dari analisis deskriptif variabel kepemilikan institusional ini terdapat sejumlah 89 sampel dengan catatan nilai minimum sebesar 0,22 yang dicapai oleh perusahaan Bumi Resources Tbk tahun 2021. Sedangkan nilai maksimum kepemilikan institusional adalah 0,98 yang dicapai oleh PT. Golden Eagle Energy Tbk tahun 2023, hal tersebut menandakan adanya perusahaan yang hampir seluruhnya dikuasai oleh lembaga atau institusi keuangan. Nilai mean atau rata-rata sebesar 0,7130 dan nilai standar deviasi sebesar 0,18778. Maka dapat dikatakan bahwa nilai standar deviasi lebih kecil dibandingkan nilai mean, hal ini menunjukkan data yang digunakan menyebar rata. Sehingga tingkat penyimpangan antar data dalam penelitian tergolong rendah.

2. Komisaris independen (X2)

Hasil dari analisis deskriptif variabel komisaris independen ini terdapat sejumlah 89 sampel dengan catatan nilai minimum sebesar 0,33 yang dicapai oleh

sejumlah entitas yang memiliki proporsi komisaris independen paling rendah dibandingkan dengan total anggota dewan komisaris. Sedangkan nilai maksimum komisaris independen sebesar 0,75 yang dicapai oleh perusahaan BUMA Internasional Grup Tbk tahun 2022-2023 dan perusahaan TBS Energi Utama Tbk tahun 2021-2022. Nilai mean atau rata-rata sebesar 0,4287 dan nilai standar deviasi sebesar 0,11690. Maka dapat dikatakan bahwa nilai standar deviasi lebih kecil dibandingkan nilai mean, hal ini menunjukkan data yang digunakan menyebar rata. Sehingga tingkat penyimpangan antar data dalam penelitian tergolong rendah.

3. Kualitas audit (X3)

Hasil dari analisis deskriptif variabel kualitas audit ini terdapat sejumlah 89 sampel dengan catatan minimum sebesar 0 yang diperoleh oleh sejumlah perusahaan yang diaudit oleh KAP non big four. Sementara itu nilai tertinggi sebesar 1 yang diperoleh perusahaan yang diaudit oleh KAP *big four*. Nilai mean atau rata rata sebesar 0,4045 dan nilai standar deviasi sebesar 0,49357. Maka dapat dikatakan bahwa nilai standar deviasi lebih dibandingkan nilai mean, sehingga dapat dikatakan bahwa data yang digunakan memiliki tingkat sebaran yang cukup tinggi dan variasi antar perusahaan dalam variabel ini sangat besar.

4. Komite audit (X4)

Hasil dari analisis deskriptif variabel komite audit ini terdapat 89 sampel dengan catatan nilai minimum sebesar 3,00 sejumlah entitas yang memiliki jumlah 3 orang yang menjabat menjadi komite audit. Sedangkan nilai maksimum komite audit yaitu sebesar 5,00 dicapai oleh perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) yang

dimana perusahaan ini memiliki jumlah komite audit yang paling banyak di antara perusahaan lain dalam sampel penelitian ini. Dengan nilai mean 3,0337 dan nilai standar deviasi 0,23594. Maka dapat dikatakan bahwa nilai standar deviasi lebih kecil dibandingkan nilai mean, hal ini menunjukkan data yang digunakan menyebar rata. Sehingga tingkat penyimpangan antar data dalam penelitian tergolong rendah.

5. *Tax avoidance* (Y)

Hasil dari analisis deskriptif variabel *tax avoidance* ini terdapat 89 sampel dengan catatan nilai minimum sebesar 0,00 yang dicapai oleh perusahaan Indo Straits Tbk tahun 2022 dan perusahaan Soechi Lines Tbk tahun 2023. Sementara itu nilai tertinggi sebesar 0,70 yang diperoleh perusahaan Medco Energi Internasional Tbk tahun 2021. Nilai mean atau rata-rata sebesar 0,2322 dan nilai standar deviasi sebesar 0,18728. Maka nilai standar deviasi lebih kecil dibandingkan nilai mean, sehingga data yang digunakan menyebar rata dan tingkat penyimpangan antar data dalam penelitian tergolong rendah.

4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.3.1 Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas ini digunakan untuk mengisi salah satu uji asumsi klasik yang dimana mengetahui bahwa data yang dipakai dalam penelitian ini sudah tersebar dengan normal atau belum. Uji normalitas penelitian ini dilakukan memakai uji statistik *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* pada program IBM SPSS 26 untuk mengetahui berdistribusi normal atau tidak residualnya. Indikator uji normalitas dengan *Kolmogorov-Smirnov*, jika tingkat signifikansi $\geq 0,05$ maka dapat

disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal dan jika tingkat signifikansi $\leq 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak terdistribusi dengan normal. Dibawah ini tabel hasil uji normalitas *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*.

Tabel 4. 4 Hasil Uji Normalitas sebelum *Outlier*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		109
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	47,22052331
Most Extreme Differences	Absolute	0,388
	Positive	0,388
	Negative	-0,331
Test Statistic		0,388
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,000 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber : Data Output SPSS Versi 26, 2025

Berdasarkan dari hasil uji normalitas data dengan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* yang disajikan pada tabel diatas, data yang diuji dinyatakan tidak berdistribusi normal. Dimana nilai signifikansinya 0,000 kurang dari 0,05 hal tersebut mengindikasikan bahwa data residual tidak berdistribusi normal dan asumsi normalitas tidak terpenuhi. Penyebab dari distribusi yang tidak normal ini disebabkan dari data yang bernilai ekstrim. Oleh sebab itu, maka dilakukan *outlier* data dengan metode box plot (Ghozali., 2021) dan memperoleh 89 sampel dari 109 sampel. Dalam proses *outlier* terdapat 20 perusahaan yang terkena *outlier*. Kemudian dilakukan uji normalitas yang kedua setelah *outlier* menggunakan *One-*

Sample Kolmogorov-Smirnov monte carlo. Berikut merupakan hasil dari uji statistik *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*.

Tabel 4. 5 Hasil Uji Normalitas Setelah *Outlier*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
			Unstandardized Residual
N			89
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		0,0000000
	Std. Deviation		0,17424127
Most Extreme Differences	Absolute		0,128
	Positive		0,128
	Negative		-0,092
Test Statistic			0,128
Asymp. Sig. (2-tailed)			0,001 ^c
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.		0,096 ^d
	99% Confidence Interval	Lower Bound	0,088
		Upper Bound	0,103
a. Test distribution is Normal.			
b. Calculated from data.			
c. Lilliefors Significance Correction.			
d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.			

Sumber : Data Output SPSS Versi 26, 2025

Berdasarkan tabel 4.5 hasil uji normalitas setelah menghilangkan data *outlier*.

Kemudian setelah dilakukan *outlier* menggunakan metode box plot diperoleh hasil uji test statistic *Kolmogorov-Smirnov* nilai signifikansi senilai 0,01. Namun, dengan menggunakan pendekatan Monte Carlo Signifikansi senilai 0,096. Sehingga pendekatan Monte Carlo yang digunakan karena hasil dari Asymp sig dikatakan tidak terdistribusi dengan normal dan data yang digunakan terlalu ekstrim sehingga harus menggunakan pendekatan uji Monte Carlo dengan nilai signifikan senilai $0,096 \geq 0,05$ yang artinya variabel kepemilikan institusional, komisaris independen,

kualitas audit, komite audit dengan variabel *tax avoidance* sudah dikatakan berdistribusi normal.

4.3.2 Hasil Uji Multikolinieritas

Pengujian multikolinearitas itu untuk mengetahui korelasi antar variabel independen dan dependen (Ghozali, 2018). Pengujian multikolinearitas itu dilakukan dengan cara mengamati dari nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan Tolerance. Apabila tolerance $> 0,10$ maka terdapat indikasi variabel tersebut memiliki Multikolinieritas dan Variance Inflation Factor (VIF) < 10 maka tidak terdeteksi adanya Multikolinieritas. Hasil dari uji multikolinearitas dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 4. 6 Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Kepemilikan Institusional	0,812	1,232
	Komisaris Independen	0,922	1,084
	Kualitas Audit	0,884	1,131
	Komite Audit	0,937	1,067

Sumber : Data Output SPSS Versi 26, 2025

Berdasarkan hasil pengujian yang tercantum dalam tabel 4.6 diatas dimana uji multikolinearitas ini memperlihatkan bahwa kepemilikan institusional ini memiliki tolerance senilai 0,812 dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) senilai 1,232. Variabel komisaris independen memiliki tolerance senilai 0,922 dan Variance Inflation Factor (VIF) senilai 1,084. Variabel kualitas audit memiliki tolerance senilai 0,884 dan Variance Inflation Factor (VIF) senilai 1,131. Serta variabel komite audit memiliki tolerance senilai 0,937 dan *Variance Inflation Factor* (VIF)

senilai 1,067. Maka dari hasil dari semua nilai tersebut memenuhi kriteria dimana semua nilai tolerance yang diperoleh lebih besar dari 0,10. Sedangkan nilai dari *Variance Inflation Factor* (VIF) juga memenuhi kriteria karena nilai yang diperoleh dari semua VIF yang didapatkan dari semua variabelnya kurang dari 10. Sehingga dapat disimpulkan tidak adanya multikolinearitas di setiap variabel independen dalam model regresi dan model penelitian ini memenuhi asumsi multikolinearitas dan dapat dipakai untuk analisis berikutnya.

4.3.3 Hasil Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi itu dipakai untuk menemukan model regresi linier ada atau tidaknya korelasi diantara kesalahan pada residual pada periode t dengan kesalahan pengganggu periode sebelumnya. Model regresi yang tepat itu bebas dari gejala autokorelasi dengan kriteria $DU < DW < 4-DU$ yang menunjukkan tidak adanya autokorelasi. Namun, dalam penelitian ini uji autokorelasi menggunakan Uji Durbin Watson dengan hasil $DL \leq DW \leq DU$ sehingga tidak dapat kesimpulan secara pasti bahwa model penelitian mengandung autokorelasi atau tidak. Hasil autokorelasi sebagai berikut:

Tabel 4. 7 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,367 ^a	0,134	0,093	0,17834	1,656
a. Predictors: (Constant), Komite Audit, Kualitas Audit, Komisaris Indepeden, Kepemilikan Institusional					
b. Dependent Variable: <i>Tax avoidance</i>					

Sumber : Data Output SPSS Versi 26, 2025

Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui bahwa terjadi gejala autokorelasi dalam model regresi. Hal ini terlihat dari perolehan nilai DW sebesar 1,656 dengan nilai perolehan dU senilai 1,7501 dan dl senilai 1,5627. Maka dapat dikatakan bahwa

penelitian ini tidak adanya autokorelasi positif dalam model yang artinya tidak ada keputusan jika model ini mengalami autokorelasi atau tidak. Sehingga penelitian ini memerlukan uji *runs test* untuk melakukan perbaikan model dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4. 8 Hasil Uji *Runs Test*

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-0,04748
Cases < Test Value	44
Cases >= Test Value	45
Total Cases	89
Number of Runs	40
Z	-1,172
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,241

Sumber : Data Output SPSS Versi 26, 2025

Berdasarkan hasil tabel 4.8 hasil uji runt test yang dimana nilai uji ini Asymp. Sig. (2-tailed) terdapat nilai sebesar 0,241. Dimana nilai $0,241 > 0,05$ sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terjadinya autokorelasi pada model regresi dalam penelitian ini.

4.3.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas yaitu uji yang digunakan untuk mengetahui dimana model regresi terdapat perbedaan varian residual di seluruh observasi model regresi. Metode yang digunakan dalam uji heteroskedastisitas ini menggunakan uji glejser yang dimana jika nilai signifikansinya $> 0,05$ maka tidak ada heteroskedastisitas, namun jika tingkat signifikansinya $< 0,05$ maka hasilnya akan terjadi heteroskedastisitas. Berikut hasil dari uji glejser:

Tabel 4. 9 Hasil Uji Heteroskedastisitas Menggunakan Uji Glejser

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,623	0,773		2,101	0,039
	Kepemilikan Inst	0,463	0,301	0,179	1,540	0,127
	Komisaris Indep	-0,713	0,453	-0,171	-1,574	0,119
	Kualitas Audit	-0,083	0,110	-0,083	-0,752	0,454
	Komite Audit	-0,292	0,222	-0,142	-1,315	0,192

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber : Data Output SPSS Versi 26, 2025

Dari tabel 4.9 menampilkan nilai signifikansi semua variabel independen yang dimiliki lebih dari 0,05. Sehingga dapat dikatakan tidak terjadinya heteroskedastisitas dalam model regresi data penelitian ini artikan dapat melanjutkan analisis berikutnya.

4.4 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Uji regresi linier berganda ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen *corporate governance* yang diukur dengan kepemilikan institusional, komisaris independen, kualitas audit, komite audit terhadap variabel dependen (*tax avoidance*). Hasil dari analisis linier berganda disajikan koefisiensi regresi sebagai berikut:

Tabel 4. 10 Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	0,296	0,290	
	Kepemilikan Inst	-0,342	0,112	-0,343
	Komisaris Indep	-0,250	0,169	-0,156
	Kualitas Audit	0,049	0,041	0,128

	Komite Audit	0,088	0,083	0,111
a. Dependent Variable: <i>Tax avoidance</i>				

Sumber : Data Output SPSS Versi 26, 2025

Berdasarkan tabel 4.10 diatas tabel koefisiensi regresi, maka dapat dibuat persamaan model regresi berganda sebagai berikut

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

$$Y = 0,296 - 0,342X_1 - 0,250X_2 + 0,049X_3 + 0,088X_4 + e$$

Berdasarkan dari tabel 4.10 maka persamaan linier berganda dapat diartikan sebagai berikut ini:

1. Nilai konstanta terdapat nilai 0,296 dengan koefisien positif yang artinya kepemilikan institusional, komisaris independen, kualitas audit dan komite audit dianggap 0 atau konstan. Sehingga nilai *tax avoidance* senilai 0,296.
2. Variabel kepemilikan institusional memiliki nilai koefisien negatif 0,342 yang artinya semakin tinggi kepemilikan institusional pada perusahaan maka akan memiliki dampak yang dapat menurunkan *tax avoidance*.
3. Variabel komisaris independen memiliki nilai koefisien negatif 0,250 yang artinya semakin banyak komisaris independen pada perusahaan maka akan memiliki dampak yang dapat menurunkan tingkat *tax avoidance*.
4. Variabel kualitas audit memiliki nilai koefisien positif 0,049 yang artinya semakin baik kualitas audit maka akan memiliki dampak yang dapat meningkatkan *tax avoidance*.

5. Variabel komite audit memiliki nilai koefisien positif 0,088 yang artinya semakin banyak komite audit maka akan memiliki dampak yang dapat meningkatkan *tax avoidance*.

4.5 Hasil Uji Goodness Of Fit

4.5.1 Hasil Uji Koefisiensi Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi bertujuan mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menguji efektivitas model dalam mendeskripsikan variasi dari variabel (X) independen terhadap variabel (Y) dependen dalam model regresi. Pengujian koefisien determinasi ini terdapat hasil sebagai berikut:

Tabel 4. 11 Hasil Uji Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,367 ^a	0,134	0,093	0,17834
a. Predictors: (Constant), Komite Audit, Kualitas Audit, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional				
b. Dependent Variable: <i>Tax avoidance</i>				

Sumber : Data Output SPSS Versi 26, 2025

Berdasarkan dari tabel 4.11 di atas, menampilkan bahwa nilai adjusted R^2 sebesar 0,093 atau 9,3%. Maka, dapat diartikan bahwa variabel independen yang terdiri dari kepemilikan institusional, komisaris independen, kualitas audit dan komite audit dapat menerangkan variabel dependen yaitu *tax avoidance* sebesar 9,3% dan sisanya yaitu 90,7% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang berada dalam luar penelitian.

4.5.2 Hasil Uji Regresi Simultan (F)

Uji statistik F dilakukan untuk melihat kelayakan model apakah ada hubungan yang signifikan atau tidak antara variabel (X) independen dan variabel (Y) dependen. Dengan ketentuan apabila nilai Sig $F < 0,05$ maka H_0 ditolak H_1 diterima, dan jika Sig $> 0,05$ maka H_0 diterima H_1 ditolak. Dari ketentuan tersebut, maka hasil dari uji signifikan simultan sebagai berikut:

Tabel 4. 12 Hasil Uji Signifikansi Simultan

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	0,415	4	0,104	3,259	0,016 ^b
	Residual	2,672	84	0,032		
	Total	3,086	88			
A. Dependent Variable: <i>Tax avoidance</i>						
B. Predictors: (Constant), Komite Audit, Kualitas Audit, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional						

Sumber : Data Output SPSS Versi 26, 2025

Berdasarkan hasil dari uji F yang dapat dilihat dari tabel 4.12 di atas menunjukkan nilai perolehan signifikansinya yaitu 0,016. Yang mana sig 0,016 $< 0,05$ dan dapat dikatakan H_0 ditolak H_1 diterima. Sehingga model regresi yang digunakan dalam penelitian ini dikatakan layak digunakan dan variabel independen (kepemilikan institusional, komisaris independen, kualitas audit dan komite audit) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* sebagai variabel dependen.

4.6 Hasil Uji Hipotesis

4.6.1 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji T atau parameter individual ini diperlukan agar mengidentifikasi pengaruh variabel bebas dengan parsial mempengaruhi variabel tertentu menggunakan asumsi variabel bebas tersebut konstan. Hasil dari uji t sebagai berikut :

Tabel 4. 13 Hasil Uji Signifikan t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0,296	0,290		1,022	0,310
	Kepemilikan Inst	-0,342	0,112	-0,343	-3,041	0,003
	Komisaris Indep	-0,250	0,169	-0,156	-1,476	0,144
	Kualitas Audit	0,049	0,041	0,128	1,189	0,238
	Komite Audit	0,088	0,083	0,111	1,057	0,293

a. Dependent Variable: *Tax avoidance*

Sumber : Data Output SPSS Versi 26, 2025

Berdasarkan dari tabel 4.13 menampilkan nilai uji t yang dapat lihat pada nilai signifikannya, dimana interpretasi variabel independen *corporate governance* yang diukur dengan kepemilikan institusional, komisaris independen, kualitas audit dan komite audit dan variabel dependen *tax avoidance* sebagai berikut:

1. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*

Dari tabel 4.13 temuan uji t dapat dilihat dimana variabel kepemilikan institusional mempunyai nilai t hitung senilai -3,041 dengan nilai signifikansinya 0,003 dimana nilai $\text{sig} < 0,05$. Hal tersebut dapat dikatakan H_0 ditolak **H_1 diterima**

dan dapat diartikan bahwa variabel kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*.

2. Pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance*

Dari tabel 4.13 temuan uji t dapat dilihat dimana variabel komisaris independen mempunyai nilai t hitung senilai -1,476 dengan nilai signifikansinya 0,144 dimana nilai $\text{sig} < 0,05$. Hal tersebut dapat dikatakan H_0 diterima **H_2 ditolak** dan dapat diartikan bahwa variabel komisaris independen tidak berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

3. Pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance*

Dari tabel 4.13 Hasil uji t dapat dilihat dimana variabel kualitas audit mempunyai nilai t hitung senilai 1,189 dengan nilai signifikansinya 0,238 dimana nilai $\text{sig} < 0,05$. Hal tersebut dikatakan H_0 diterima **H_3 ditolak** dan dapat diartikan bahwa variabel kualitas audit tidak berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

4. Pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*

Dari tabel 4.13 Hasil uji t dapat dilihat bahwa variabel komite audit memiliki nilai t hitung senilai 1,057 dengan nilai signifikansinya 0,293 dimana nilai $\text{sig} < 0,05$. Hal tersebut dikatakan H_0 diterima **H_4 ditolak** dan dapat diartikan bahwa komite audit tidak berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

4.7 Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilaksanakan terdapat hasil dimana pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen, kualitas audit dan

komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan energy yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021-2023. Berikut pembahasan hasil dari penelitian:

4.7.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional (X1) Terhadap *Tax Avoidance*

Dari temuan pengujian yang sudah dilaksanakan, diketahui kepemilikan institusional ini menunjukkan nilai negatif dan signifikan yang mana besar signifikansinya kurang dari 5% atau 0,05. Pengujian ini menjelaskan bahwa meningkatnya kepemilikan institusional ini berdampak negatif terhadap *tax avoidance*, sehingga hipotesis diterima. Sehingga dapat diartikan dimana kepemilikan institusional ini dapat berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* atau kepemilikan institusional ini dapat mengurangi tindakan *tax avoidance*. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang telah diajukan yang dimana kepemilikan institusional ditentukan dengan banyaknya saham institusi yang dibagi dengan banyaknya saham yang beredar itu berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Kepemilikan institusional itu pengendali yang berasal dari luar perusahaan yang menjabat peran penting sebagai monitor manajemen. Maka kepemilikan institusional ini pengawasan akan lebih optimal, karena investor institusional akan melihat bagaimana manajemen taat dengan aturan yang menghasilkan laba. Maka investor institusional berpengaruh dalam menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan tindakan *tax avoidance* (Fiska & Rusdi, 2020). Dalam teori agensi terdapat interaksi antar pihak yang berkepentingan dengan perusahaan dan masing-masing dari pihak itu memiliki kepentingan pribadi, sehingga menimbulkan konflik dan harus dicegah dengan pengawasan dari pihak luar yang dapat mengawasi masing-

masing dari pihak yang memiliki perbedaan kepentingan itu. Tingginya kepemilikan institusional dapat meningkatkan pengawasan lebih ketat dan optimal sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik manajer dan menurunkan peluang tindakan *tax avoidance*. Sehingga kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*.

Hasil dari penelitian ini dinyatakan bahwa hipotesis pertama diterima dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hasil dari hipotesis penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ginting & Kartika, 2023), (Pratomo & Rana, 2021) yang menghasilkan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut berbeda dengan riset yang dilaksanakan oleh (Nurhaliza & Sari, 2023) yang menghasilkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

4.7.2 Pengaruh Komisaris Independen (X2) Terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan dari pengujian yang telah dilaksanakan, diketahui bahwa komisaris independen ini menunjukkan nilai negatif dan nilai signifikansinya lebih dari 5% atau 0,05. Sehingga dalam pengujian ini hipotesis ditolak dan dapat diartikan bahwa komisaris independen ini tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis yang telah diajukan dimana komisaris independen diukur dengan membagi jumlah dewan komisaris independen dengan seluruh jumlah dewan komisaris pada perusahaan tersebut tidak berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Komisaris independen ini berperan sebagai pengawas manajemen untuk memastikan keseimbangan dalam pengambilan keputusan yang diambil manajemen di antara pemegang saham minoritas dengan pihak yang berkepentingan sehingga komisaris independen itu pihak yang tidak memiliki hubungan antara anggota direksi perusahaan dan anggota dewan komisaris lainnya. Perusahaan yang memiliki jumlah komisaris independen tinggi akan semakin teliti dalam meminimalisir dalam pelaporan pajak. Sehingga dalam teori agensi, komisaris independen ini berasal dari perusahaan eksternal yang mengontrol tindakan perusahaan. Semakin besar jumlah komisaris independen, maka semakin rendah kemungkinan praktik *tax avoidance* yang dilaksanakan manajemen. Namun, dalam penelitian ini tidak terjadi peningkatan jumlah anggota komisaris independen dalam setiap tahunnya, bahkan terdapat beberapa perusahaan mengalami penurunan jumlah anggota komisaris independen di antara 3 periode penelitian ini. Sehingga komisaris independen ini tidak berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Hasil dari penelitian ini dinyatakan bahwa hipotesis kedua ditolak dan komisaris independen tidak berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hasil dari hipotesis penelitian ini sama seperti penelitian (Rospitasari & Oktaviani, 2021) yang menghasilkan komisaris independen tidak berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut berbeda dengan penelitian (Nurhaliza & Sari, 2023) yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

4.7.3 Pengaruh Kualitas Audit (X3) Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil dari penelitian ini hipotesis dinyatakan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Pengujian hipotesis yang digunakan ini telah dijabarkan pada tabel 4.13 diketahui bahwa H_3 ditolak dan artinya kualitas audit tidak berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut dapat terjadi karena kualitas audit yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) non big four mampu memberikan transparansi dan kemampuan tinggi yang dapat bersaing dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) big four untuk mempertahankan reputasi dan kepercayaan klien. Sehingga kualitas audit yang dinilai dari ukuran KAP *big for* ataupun non big four ini tidak dapat menentukan penurunan ataupun peningkatan tindakan *tax avoidance*. Pada penelitian ini perusahaan banyak yang menggunakan KAP *non big four* yang mana, KAP *non big four* mampu bersaing dengan KAP *big four*.

Dalam teori agensi terdapat asimetri informasi pada manajemen dan pemegang saham, dimana manajemen memiliki informasi lengkap dan prospek perusahaan dimasa yang depan dibandingkan dengan pemangku kepentingan lainnya. Sehingga aktivitas audit itu gambaran dari prinsip transparansi penerapan *corporate governance* dan kualitas audit ini akan membantu memecahkan masalah manajemen dan pemegang saham salah satunya masalah *tax avoidance* ini (Jusman & Nosita, 2020). Namun, hasil dari penelitian ini tidak sama dengan hipotesis yang dikatakan sebelumnya bahwa kualitas audit yang diukur dengan variabel dummy dimana komite audit itu berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hasil

dari penelitian ini yaitu kualitas audit tidak menyebabkan perubahan yang signifikan terhadap tingkat penurunan ataupun peningkatan tindakan *tax avoidance*.

Hasil dari penelitian ini dinyatakan bahwa hipotesis ketiga ditolak dan kualitas audit tidak berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hasil dari hipotesis penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ginting & Kartika, 2023) yang mengatakan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fitrianingsih & Wulandari, 2024) dan (Mira & Purnamasari, 2020) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

4.7.4 Pengaruh Komite Audit (X4) Terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil dari penelitian ini hipotesis dinyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Pengujian hipotesis yang digunakan ini telah dijabarkan pada tabel 4.13 diketahui bahwa H_4 ditolak dan artinya komite audit tidak berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa semakin banyak anggota komite audit tidak memberikan jaminan intervensi peran penentu kebijakan jumlah tarif pajak di perusahaan. Perusahaan melakukan penghindaran pajak bukan karena banyaknya jumlah anggota komite audit, tetapi dari kualitas kerja yang dilakukan dari anggota komite auditnya itu. Namun, komite audit ini kinerjanya belum mampu berjalan dengan maksimal dan pengawasannya belum menghasilkan informasi berkualitas yang dapat melakukan pengendalian dalam meminimalisir terjadinya konflik kepentingan, salah satunya *tax avoidance* ini.

Dalam teori agensi komite audit itu pihak yang ditunjuk dewan komisaris untuk menjalankan fungsi pengawasan atau proses penyusunan laporan keuangan perusahaan guna mencegah terjadi fraud yang dilakukan pada pihak manajemen. Namun, hasil dari penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis awalnya yang mengatakan bahwa komite audit yang diukur dengan dengan jumlah anggota komite audit itu berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hasil dari penelitian ini yaitu jumlah komite audit tidak menyebabkan perubahan yang signifikan terhadap tingkat penurunan ataupun peningkatan tindakan *tax avoidance*.

Hasil dari penelitian ini dinyatakan bahwa hipotesis keempat ditolak dan komite audit tidak berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hasil dari hipotesis penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Purbowati, 2021) yang mengatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ginting & Kartika, 2023) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari analisa penelitian yang telah dilakukan hasilnya ialah perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2023 mengenai *corporate governance* yang diukur dengan kepemilikan institusional, komisaris independen, kualitas audit dan komite audit terhadap *tax avoidance* dengan total 34 perusahaan dengan total 89 sampel data selama 3 tahun. Data diolah dalam penelitian ini menggunakan IBM SPSS versi 26 dan berikut rangkuman penelitian sebagai berikut:

1. Hipotesis pertama diterima, kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan dimana semakin tinggi jumlah kepemilikan institusional maka *tax avoidance* semakin rendah dan jika semakin rendah jumlah kepemilikan institusional maka semakin tinggi tindakan *tax avoidance*. Hasil dari kepemilikan institusional dapat berpengaruh langsung dengan arah negatif terhadap *tax avoidance*.
2. Hipotesis kedua ditolak, komisaris independen tidak berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan dimana jumlah komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena fungsi dari pengawasan komisaris independen terhadap kebijakan perpajakan belum berjalan dengan optimal, sehingga komisaris independen belum mampu mengurangi tindakan *tax avoidance*. Hasil dari komisaris independen tidak berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

3. Hipotesis ketiga ditolak, kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan dimana kualitas audit yang dikeluarkan KAP non big four dapat melaksanakan transparansi dan mampu bersaing dengan KAP big four untuk mendapatkan kepercayaan klien sehingga kualitas audit yang didapatkan dari ukuran KAP tidak dapat menentukan tingkat *tax avoidance*. Hasil dari kualitas audit tidak berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.
4. Hipotesis keempat ditolak, komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan penghindaran pajak bukan karena banyaknya jumlah anggota komite audit, tetapi dari kualitas kerja yang dilakukan dari anggota komite auditnya itu. Namun, komite audit ini kinerjanya belum mampu berjalan dengan maksimal dan pengawasannya belum menghasilkan informasi berkualitas yang dapat melakukan pengendalian dalam meminimalisir terjadinya konflik kepentingan *tax avoidance* ini. Sehingga hasil dari komite audit tidak berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam melaksanakan analisis, peneliti menyadari bahwa peneliti masih memiliki beberapa keterbatasan diantaranya sebagai berikut:

1. Pada penelitian ini hanya menggunakan sampel perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023 yang tidak dapat menjadikan acuan yang menggeneralisir perusahaan dengan sektor jenis yang berbeda.

2. Berbagai informasi yang tidak tersaji lengkap dalam laporan keuangan maupun laporan tahunan pada variabel kepemilikan institusional, komisar audit, kualitas audit, komite audit dan *tax avoidance*. Sehingga menyebabkan data tidak dapat diukur sebesar periode sampel data. Penelitian ini peneliti hanya menggunakan data perusahaan yang mencantumkan informasi lengkap pada laporan keuangan dan laporan tahunan.
3. Berdasarkan hasil dari uji normalitas terdapat hasil pengujian data residual yang tidak normal yang disebabkan oleh data ekstrim (*outlier*) sehingga mempengaruhi hasil uji normalitas ini dan setelah pelaksanaan penghapusan, 20 data *outlier* ini kemungkinan telah mengubah karakteristik dalam populasinya.
4. Berdasarkan hasil dari nilai Adjusted R^2 tabel 4.11 diperoleh nilai sebesar 0,093. Nilai tersebut berarti bahwa variabel kepemilikan institusional, komisar independen, kualitas audit dan komite audit dapat menjelaskan hubungan sebanyak 9,3% terhadap *tax avoidance* dan sisanya sebesar 90,7% dipengaruhi oleh faktor variabel lainnya di luar penelitian.

5.3 Saran

Dari hasil penelitian, terdapat kesimpulan serta kekurangan dalam penelitian ini, saran yang dapat peneliti berikan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi akademisi

Penelitian selanjutnya dapat menambahkan atau menggunakan variabel lain untuk memperluas penelitian serta dapat menggunakan sektor perusahaan

lain dengan menggunakan pengukuran pengukuran lainnya. Perkembangan model analisis kompleks dan analisis faktor lainnya yang dapat mempengaruhi tindakan *tax avoidance* ini, seperti kepemilikan manajerial dan kepemilikan asing yang masih berkaitan dengan *corporate governance* ataupun variabel lainnya.

2. Bagi Perusahaan

Perusahaan diharap dapat memperkuat penerapan prinsip *corporate governance* dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif. Sehingga variabel kepemilikan institusional sehingga komisaris independen, kualitas audit dan komite audit dapat meminimalkan praktik *tax avoidance*.



DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, N. M. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. *Maksimum Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, 171–189.
- Fadilah, S. N., Rachmawati, L., & Dimyati, M. (2021). Pengaruh Komite Audit, Dewan Komisaris Independen Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak Di Perusahaan Keuangan. *JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia)*, 6(2), 263–290.
- Fiska, A., & Rusdi, D. (2020). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak. *Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu)* 3, 490–512.
- Fitrianingsih, D., & Wulandari, P. (2024). Pengaruh Komite Audit Dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance Di Perusahaan Manufaktur Food And Beverages Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode Tahun 2018-2022. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomi Jurnal Ekonomika*, 17 (1), 294–302.
- Ghozali. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS* (10th ed.).
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS* 25. Universitas Diponegoro.
- Ginting, R. M. B., & Kartika, T. P. D. (2023). Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *AKUNESA: Jurnal Akuntansi Unesa*, 11(3), 300–310.
- Henti Nurhaliza, I. R. S. (2023). Pengaruh Kepemilikan Institusi, Komisaris Independen Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak. *Journal Of Humanities, Social Sciences And Business (JHSSB)*, 2(4), 742–753.
- Hidayah, N., & Puspita, D. A. (2024). Pengaruh Transfer Pricing , Capital Intensity , Komite Audit , dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 13(1), 28–39.
- Jayanti, D. (2024). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Corporate Social Responsibility terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah Dan Pajak*, 1(3), 78–90.
- Jensen, C., & Meckling, H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal Of Financial Economics*, 3(305), 360. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Jusman, J., & Nosita, F. (2020). Pengaruh Corporate Governance , Capital Intensity dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance pada Sektor Pertambangan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 697–704.

<https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.997>

- Karima Anisa Safitri, D. M. (2020). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility , Profitabilitas , Leverage , Capital Intensity Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 9, 1–11.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Laporan Pemerintahpelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Semester Pertama*.
- Lestari, H. T., & Ovami, D. C. (2020). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Asuransi di Indonesia. *Journal of Trends Economics and Accounting Research*, 1(1), 1–6.
- Marlinda, D. E., Titisari, K. H., & Masitoh, E. (2020). Pengaruh Gcg, Profitabilitas, Capital Intensity, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 39. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.86>
- Mira, & Purnamasari, A. W. (2020). Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Perbankan yang terdaftar di BEI periode 2016-2018. *Jurnal Riset Perpajakan*, 3(November), 211–226.
- Nuramal, Mispa, S., & Sahidah. (2023). "Dimensi Good Corporate Governance Terhadap Tax. *Akmen Jurnal Ilmiah*, 20, 137–147.
- Nurhaliza, H., & Sari, I. R. (2023). The Influence Of Institutional Ownership , Independent Commissioners And Capital Intensity On Tax Avoidance. *Journal Of Humanities, Social Sciences And Business (JHSSB)*, 2(4), 742–753. <https://ojs.transpublika.com/index.php/JHSSB/>
- Otoritas jasa keuangan republik indonesia, (2015).
- Prasetyo, A. W., & Primasari, N. H. (2021). Pengaruh Komisaris Independen, Pertumbuhan Penjualan, Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan FEB Universitas Budi Luhur*, 10(1), 1–18.
- Pratomo, D., & Rana, R. A. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 91–103.
- Purbowati, R. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Penghindaran Pajak). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Dewantara*, 4(1), 61–76.
- Putri, A. A., & Lawita, N. F. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Ekonomika*, 9.

- Putri, W. A., & Halmawati. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Tata Kelola Perusahaan terhadap Tax Avoidance: Studi Empiris Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 5(1), 176–192. <https://doi.org/https://doi.org/10.24036/jea.v5i1.701>
- Rombbunga, M., & David, A. (2019). Tata Kelola Perusahaan dan Penghindaran Pajak. *Perspektif Akuntansi*, 2(3), 249–267.
- Rospitasari, N. R., & Oktaviani, R. M. (2021). “ Analisa Pengaruh Komite Audit , Komisaris Independen Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak “ *JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen , Ekonomi , dan Akuntansi)*. *Jurnal Ilmiah MEA*, 5(3), 3087–3099.
- Rusdiani, W., & Umaimah. (2023). Pengaruh Komisaris Independen , Komite Audit , dan Kualitas Audit terhadap Tax Avoidance. *Journal of Culture Accounting and Auditing*, 2(2), 54–68.
- Sartori, N. (2010). *Effect of Strategic Tax Behaviors on Corporate Governance*. <http://www.ssrn.com>.
- Subekti, A. M., & Amin, M. Al. (2018). Pengaruh Corporate Governance Dan Insentif Eksekutif Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Pada BEI tahun 2009-2018). *Prosiding 2nd Business and Economics Conference In Utilizing of Modern Technology*.
- Suciati, F., & Wulandari, S. (2022). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak Di Badan Usaha Milik Negara. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 13. No 03, 1083–1090.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- WIDODO, S. W., & SARTIKA WULANDARI. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity, Sales Growth dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Sistem Informasi, Manajemen Dan Akuntansi (SIMAK)*, 19(01), 152–173.
- Zainuddin, & Anfas. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Kepemilikan Institusional Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak Di Bursa Efek Indonesia. *Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA)*, 3(2), 85–102. <https://doi.org/10.31605/jepa.v3i2.918>